

MODUL

PENANGANAN KONFLIK BERNUANSA KEAGAMAAN



Tim Penulis:

ST. Tri Guntur Narwaya

Masmoelyadi Wijaya

Leopold Sudaryono

Irfan Abu Bakar

Puguh Windrawan

Kombes Pol DR. Chryshnanda Dwi Laksana, M.Si

MODUL

PENANGANAN KONFLIK BERNUANSA KEAGAMAAN

Tim Penulis:

ST. Tri Guntur Narwaya

Masmoelyadi Wijaya

Leopold Sudaryono

Irfan Abu Bakar

Kombes Pol DR. Chryshnanda Dwi Laksana, M.Si

Puguh Windrawan

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ST.Tri Guntur Narwaya, Masmoeiyadi Wijaya, Leopold Sudaryono,
Irfan Abu Bakar, Kombes Pol DR Chryshnanda Dwi Laksana,M.Si.,
Puguh Windrawan.
Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan, Yogyakarta: PUSHAM
UII, September 2013

99 halaman, 17 x 24 cm

Cetakan Pertama,September 2013
layout : Ahmad Setiawan
Desain sampul : Bakar Wibowo

Diterbitkan atas kerjasama:
PUSHAM UII - AKPOL - The Asia Foundation - DANIDA

PUSHAM UII
Jeruklegi RT. 13 RW. 35 Gg .Bakung No. 517A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 55198
Telp. 0274-452032, Fax. 0274-452158
E.mail:pushamuii@yahoo.com

Kata Pengantar

Konflik bernuansa keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia memang cenderung menggelisahkan. Tidak saja menjadi santapan pemburu berita semata, namun lebih dari itu. Muncul korban kekerasan, yang tak jarang malah menimbulkan kehilangan nyawa. Kondisi ini memicu persoalan yang lebih besar karena kemudian pelanggaran HAM terjadi. Entitas yang bertanggungjawab, dalam hal ini negara, sebenarnya menjadi penentu situasi ini.

Sebagai salah satu aparat pemerintah, Polisi boleh dikatakan menjadi aktor yang paling penting. Posisinya begitu strategis dalam ruang lingkup konflik bernuansa keagamaan ini. Pengamanan secara konvensional tidak lagi bisa dijadikan acuan dalam bertindak. Perlu pengetahuan khusus soal konflik bernuansa keagamaan, yang tak jarang melibatkan kepentingan lain.

Mereka yang dipersepsikan sebagai 'korban', yang di Indonesia biasanya dialami oleh minoritas, perlu dirangkul dan dilindungi. Polisi tidak bisa larut dalam kepentingan sesaat atau tunduk pada kepentingan mayoritas. Dalam konsep HAM, mereka yang menjadi 'korban' harus senantiasa mendapatkan tempat yang semestinya.

Modul ini hadir dalam rangka memberikan acuan dan fasilitasi bagi Kepolisian. Tentu saja dalam hubungannya dengan penanganan konflik bernuansa keagamaan. Modul ini juga disusun untuk menjadi jembatan antara teori dan praktek di lapangan. Berbagai jenis metodologi dipergunakan dalam modul ini. Mulai dari curah pendapat, study kasus, kesaksian para korban kekerasan, hingga praktek lapangan.

Sejatinya modul ini memang belum sempurna. Namun, setidaknya bisa memberikan pengetahuan kepada khalayak yang berkepentingan. Termasuk bagi Polisi yang memang langsung berhadapan dengan kondisi di lapangan.

Hormat kami,

PUSHAM UII

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
MODUL I	5
Materi I : Berjumpa dan Mendengar Kesaksian Para ‘Korban’	8
Materi II : Perlindungan Kemerdekaan Beragama dalam Konstitusi Negara Indonesia	11
Materi III : Peran Kepolisian dalam Menjamin Perlindungan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan.	14
Bahan Bacaan I : Landasan Peraturan Tentang Peran Polri dalam Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan	16
Bahan Bacaan II : Konflik dan Kekerasan Bernuansa Keagamaan	19
MODUL II 39	
Materi I : Pengertian Umum dan Tipe-Tipe Konflik	41
Materi II : Konflik Bernuansa Keagamaan	44
Materi III : Analisis Konflik Bernuansa Keagamaan	46
Bahan Bacaan I : Definisi Konflik	48
Bahan Bacaan II : Bahaya Prasangka, Stereotip, dan Diskriminasi	25
Bahan Bacaan III : Apa dan Mengapa Menganalisis Konflik?	58
MODUL III 65	
Materi I : Sebelum Terjadinya Insiden	67
Materi II : Saat Terjadinya Insiden	70
Materi III : Pasca Insiden	72
Bahan Bacaan I : Intervensi Polisi Dalam Tahapan-Tahapan Kekerasan dan konflik	73
Bahan Bacaan II : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Keagamaan Berdasarkan Fungsi	77
Bahan Bacaan III : Cerita dari Bekasi	85
MODUL IV	95
Pemahaman Akan Kondisi Lapangan	95



MODUL I

IDEOLOGI NEGARA DAN HAM DALAM KONSTITUSI

Penulis: ST. Tri Guntur Narwaya

Pancasila: Nilai Fundamental Bernegara

Sulit membayangkan sebuah negara bisa berjalan tanpa ikatan nilai yang dipakai secara bersama. Inilah kiranya yang menjadi alasan bagi para pendiri bangsa untuk meletakkan sebuah falsafah moral bagi warga negara, yang kemudian dikenal sebagai 'Pancasila'. Kemajemukan bangsa dengan berbagai nilai kearifan yang ada, membutuhkan cara dan ruang pengelolaan yang benar.

Di lain sisi, Pancasila tidak lagi dipahami sebagai sebuah nilai doktriner, yang justru akan mendangkalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dianggap sebagai tatanan yang hidup. Anggapan itu lebih berharga ketimbang hanya menempatkannya sebagai persoalan teks normatif dan formal belaka. Sebagai sebuah prinsip akan konsensus nilai bersama, Pancasila tak lagi bisa dirubah atau digeser.

Merubah dan menggesernya berarti secara prinsipil juga akan menggeser wajah dari bangunan dasar kenegaraan yang ada. Pada nilai dasar sampai metodologi praktik yang diturunkan harus utuh difahami secara benar. Pancasila tidak akan berhenti pada semboyan, tetapi menjadi sikap pandangan paling mendasar yang harus dijadikan rujukan.

Sekedar memahami Pancasila dalam tataran legal dan formal tentu akan melempar kita pada pandangan-pandangan yang kering makna. Satu sisi akan melahirkan tafsir yang tidak mendalam, sisi yang lain juga akan menjebak pada dogmatisme tertutup, yang kadang dalam pengalaman sejarah justru melempar pada tindakan-tindakan kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Berkaca dalam pengalaman itu, maka Pancasila tidak diletakan sebagai ideologi tertutup, tetapi sebagai falsafah yang terus terbuka dengan berbagai pergumulan persoalan-persoalan yang ada. Pancasila bahkan bisa dipandang sebagai visi bersama dan kontrak sosial dari semua nilai yang ada dan hidup di Indonesia. Pancasila menjadi perekat sekaligus pengikat semua nilai, kebudayaan dan pandangan hidup.

Jika memandang peran dan posisi ini, sejatinya Pancasila telah memberi dasar pandangan tentang sebuah bangsa yang majemuk, plural dan beragam. Berbagai suku, agama, adat-istiadat, selalu mendapat tempat. Negara dalam rangka ini sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat wajib membangun peran sebagai pelindung, pengayom dan juga penata kehidupan publik yang toleran. Tanpa usaha merawat dan menjaga sikap toleran dan penghargaan ini, maka sebenarnya nilai-nilai yang hadir dalam jiwa Pancasila diam-diam dibiarkan tereduksi dan semakin tidak dihargai.

Hubungan melekat akan kedudukan Pancasila dan negara secara jelas dan definitif tertera sejak sambutan pertama kali Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Secara eksplisit dan gamblang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar yang melandasi bangunan negara Republik Indonesia. Pancasila kemudian dianggap sebagai ideologi negara. Pemahaman ideologi dalam rangka ini adalah keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Berkait dengan Pancasila, minimal kita bisa meletakkan beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman bersama dalam kehidupan bernegara. Beberapa catatan penting itu adalah :

1. Konsensus atas Pancasila sejatinya merupakan komitmen pada sendi-sendi pokok yang menjadi dasar untuk membangun sebuah soliditas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, Pancasila menjadi konstitusi fundamental yang menjadi norma hukum dasar bagi terbentuknya bangunan politik yang dicitakan. Sebagai 'dasar negara', konsensus ini mengikat semua warga negara tanpa kecuali.
2. Sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila merupakan milik bersama. Semua orang, semua kelompok, dan semua kepentingan yang ada akan saling menghargai satu dengan yang lain. Rasa penghargaan atas kemajemukan dan perbedaan menjadi prinsip mendasar dalam Pancasila dan wajib ditaati oleh semua elemen masyarakat.
3. Pancasila selanjutnya juga bisa difahami sebagai sumber identitas masyarakat Indonesia yang secara realitas memang beragam dan majemuk. Menjaga maupun merawat Pancasila sejatinya juga bisa dikatakan telah menyumbang cara dalam menghormati dan merawat kemajemukan.

MATERI I :

BERJUMPA DAN MENDENGAR KESAKSIAN PARA 'KORBAN'

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none">1. Mempertemukan para Taruna dengan suara kesaksian korban, yakni mereka yang mengalami peristiwa kekerasan dan konflik sosial yang membawa kepentingan isu agama.2. Membantu dan mengajak para Taruna untuk secara langsung mendengar, melihat dan berdialog dengan tuturan 'korban' dari kekerasann yang dialaminya.3. Memberikan kedekatan empati bagaimana sebuah persoalan kekerasan bernuansa keagamaan dilihat dari 'perspektif korban' secara langsung.4. Mengajak para Taruna untuk bisa menganalisis persoalan dan dinamika kekerasan bernuansa keagamaan dari berbagai dimensi terutama dari korban kekerasan dan konflik.
WAKTU	45 Menit
TEMPAT	Ruang Kelas Pembelajaran di Akpol
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas plano/papan tulis2. Spidol3. LCD dan Layar Komputer

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pengantar:

Sebelumnya, fasilitator utama membuka dengan pembahasan; bagaimana para Taruna Akpol bisa membaca dan memahami sebuah kekerasan sosial bernuanansa keagamaan dengan lebih mendalam. Pada setiap kekerasan terutama yang menyeret kepentingan isu agama, selalu ada pihak-pihak yang akan menjadi korban. Problem kekerasan sosial tersebut tak hanya pada gambaran fakta penanganan peristiwa semata. Problem yang lebih luas adalah bagaimana bisa secara komprehensif meletakkan penghormatan dan empati pada setiap korban yang relatif dirugikan dalam setiap kejadian kekerasan. Fasilitator bisa memberikan beberapa contoh beberapa kekerasan sosial yang mengatasnamakan kepentingan isu agama. Sesekali bisa memancing dengan interaktif tanggapan dan respon dari para Taruna. Kira-kira pengantar bisa menggunakan waktu 10 menit.

Langkah dan Alur Proses :

1. Fasilitator sebelumnya memperkenalkan secara ringkas orang yang akan memberikan testimoni pada ruang pembelajaran tersebut. Perkenalan awal lebih diutamakan untuk menjelaskan latar belakang peristiwa kekerasan dan dalam posisi apa korban tersebut berada.
2. Fasilitator mempersilahkan 'korban' untuk selanjutnya memberikan tuturan dan kesaksian atas peristiwa yang dialami.
3. Pihak 'korban' secara deskriptif memulai menceritakan pengalaman atas kejadian yang menimpanya.
4. Setelah dirasa sudah cukup memberikan tuturan pengalamannya, 'korban' bisa dibantu oleh fasilitator memberikan waktu dan kesempatan para Taruna akpol untuk memberikan kesan dan tanggapan atas testimoni tersebut. Dusahakan ruang dialognya tidak sedang mendebatkan tentang opini atau pendapat, melainkan mendorong para Taruna mendekati sisi-sisi subjektivitas pengalaman jika atau seandainya mereka ada situasi pengalaman tersebut.
5. Setelah testimoni dan dialog selesai, fasilitator memberikan poin-poin catatan penting dari proses yang sudah berlangsung tadi. Catatan tersebut lebih untuk menggugah aspek afeksi dan para Taruna untuk bisa membaca setiap pengalaman penanganan konflik dalam perspektif korban.

6. Pihak korban bisa meninggalkan ruang kelas pembelajaran dan selanjutnya fasilitator memegang kembali alur proses materi selanjutnya.

Pertanyaan untuk Diskusi:

1. Bagaimana sikap dan kesan anda mendengar dan membaca testimoni tersebut, dan bagaimana menurut anda jika anda ada dalam posisi yang dialami oleh 'korban'?
2. Apakah anda (Taruna), pernah mempunyai pengalaman batin yang sama terhadap kasus kekerasan yang menimpa teman, saudara atau keluarga anda?
3. Seandainya kemudian tidak ada lagi sebuah norma, hukum atau nilai yang dipegang bersama sebagai prinsip fundamental bersama yang dipegang oleh semua warganegara, bagaimanakah menurut anda?
4. Jika anda melihat kasus seperti di atas (yang ditestimonikan oleh korban) atau serupa dan seandainya anda warga biasa (bukan polisi), apa yang ada dalam hati dan pikiran anda pada saat itu?

MATERI II

PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN BERAGAMA DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

TUJUAN MATERI:	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pemaparan dan pendalaman tentang prinsip falsafah berpikir; bagaimana meletakkan berbagai poin nilai konstitusi negara Indonesia yang harus menjadi dasar dari setiap pembacaan dan penanganan persoalan kekerasan sosial yang bernuansa keagamaan.2. Memberikan penjelasan tentang landasan-landasan penting yang dipakai sebagai prinsip pedoman dasar dalam penanganan kekerasan sosial yang bernuansa keagamaan.3. Menjelaskan bahwa negara dalam masalah ini wajib untuk memberi perlindungan terhadap atas kemerdekaan kehidupan beragama dan berkeyakinan dengan prinsip netralitas dan imparsialitas yang harus dijaga.4. Meyakinkan kepada para Taruna, bahwa institusi Kepolisian adalah institusi negara yang berkewajiban untuk menjadi penjaga dan pengayom bagi tercapainya kemerdekaan kehidupan beragama dan berkeyakinan yang tertuang dan diatur secara prinsipiil dalam nilai-nilai dasar Pancasila dan peraturan perundangan yang ada.5. Memberikan gambaran atas berbagai persoalan cara pandang yang masih belum selesai atas prinsip landasan konstitusi ini, sehingga dalam realitas pengalaman sering justru menambah problem persoalan. Masih banyak petugas Kepolisian yang belum secara prinsipiil meletakkan prinsip dasar ini.
WAKTU	60 menit
TEMPAT	Ruang kelas pembelajaran Akpol

BAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas plano/Papan Tulis 2. Spidol 3. LCD dan Layar Komputer 4. Paper/ Makalah
-------	--

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pengantar:

Menjelaskan kepada para Taruna bahwa prinsip-prinsip hukum dan konstitusi tentang perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan sejatinya sudah diatur secara tegas dalam berbagai konstitusi dasar negara. Prinsip-prinsip itu bisa digali dari Pancasila, UUD 1945, undang-undang serta berbagai kebijakan negara dan pemerintah yang sudah ada. Fasilitator juga menjelaskan bahwa penting untuk memahami prinsip tersebut bukan dalam kerangka teks normatif yang kering dan beku, melainkan mendalaminya sampai ke akar filosofis yang dibuat.

Langkah-langkah dan Alur Proses:

1. Fasilitator mengantarkan awal apa kepentingan dan capaian dari materi yang mau disampaikan. Fasilitator juga bisa memulai dengan beberapa pertanyaan kunci tentang apa fungsi dan peran dari setiap konstitusi yang dihadirkan?
2. Pada tataran pengalaman, fasilitator bisa mengajak para Taruna untuk melihat pengalamannya sendiri berhadapan dengan konstitusi-konstitusi tersebut. Poinnya adalah memancing pertanyaan, bagaimana pengalaman mereka selama ini memahami korelasi dan kedudukan konstitusi bagi tata kehidupan keberagamaan.
3. Fasilitator memancing tanggapan dari para Taruna mengenai beberapa prinsip penting yang diketahui dan difahami mereka.
4. Selanjutnya fasilitator memberikan beberapa paparan tentang nilai dasar, prinsip dan juga aturan konstitusional tentang perlindungan kemerdekaan kehidupan beragama di Indoensia. Seyognyanya dihindari untuk memberikan ceramah yang kering dan monoton. Diusahakan menggunakan pendekatan interaktif biar para Taruna tetap konsentrasi dan terlibat dalam diskusi.

5. Fasilitator memberikan beberapa poin kunci dari materi yang sudah dibawakan dan poin-poin itu harus menjadi catatan yang harus dibawa oleh para Taruna.

Pertanyaan untuk Diskusi:

1. Apakah anda (Taruna) memahami peran sejatinya sebuah norma, aturan, hukum, dan nilai bersama disepakati dan dibuat? Kepentingan mendasanya apa?
2. Sejauh mana anda sekarang memahami dan menghayati Pancasila dalam kehidupan anda? Apa arti penting Pancasila bagi kehidupan anda?
3. Jika ada sebuah kasus kekerasan sosial yang begitu banyak akan menimbulkan korban, jika diletakkan dalam berbagai norma dan hukum dasar ini. Apa pandangan analisis anda? Apakah karena hukumnya masih lemah dan kurang, atau karena pelaksanaan hukumnya yang masih bermasalah?
4. Konstitusi-konstitusi apa yang paling anda ingat yang memberi landasan anda untuk mensikapi problem kekerasan mengatasnamakan agama tersebut? Bisa anda jelaskan?

MATERI III

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan tentang konsep kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Sekaligus memberi gambaran mendasar; mengapa kemerdekaan beragama ini menjadi penting dalam kerangka berjalannya negara demokrasi seperti Indonesia;2. Memberikan gambaran pemahaman mengenai peran dan kewajiban negara dalam menjaga, merawat dan melindungi ruang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan;3. Mengajak Taruna untuk menggali berbagai metodologi dan strategi dalam rangka tugas perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan;4. Mengajak para Taruna untuk mendiskusikan upaya perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang telah dilakukan oleh negara.
WAKTU	60 menit
TEMPAT	Ruang Kelas Pembelajaran di Akpol
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas plano/ Papan Tulis2. Spidol3. LCD dan Layar Komputer4. Paper/ Makalah5. Lembar kasus (Kliping Koran)

ALUR PROSES PEMBELAJARAN

Pengantar:

Materi ini sebenarnya ingin mengajak para Taruna untuk menyadari bahwa mereka berkewajiban penuh memberi perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

Langkah-langkah dan Alur Proses:

1. Fasilitator pada saat awal memberikan tekanan penjelasan lebih dulu mengenai tujuan materi. Bisa dengan bentuk pertanyaan reflektif, semisal tentang apriori masyarakat atas peran Polisi yang belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam kerangka perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.
2. Fasilitator sebelumnya menyiapkan beberapa klipng koran atau majalah tentang kasus konflik dan kekerasan yang bernuansa keagamaan, dan juga sebuah gambaran kasus bagaimana Polisi melakukan sikap dan tindakannya terhadap kasus tersebut.
3. Fasilitator kemudian membagi kelas menjadi beberapa kelompok (d disesuaikan dengan kebutuhan) dan masing-masing kelompok diberikan penjelasan mengenai proses analisis.
4. Fasilitator kemudian membagikan lembar kasus yang sudah digandakan sebelumnya kepada masing-masing kelompok. Seyogyanya masing-masing kelompok berbeda lembaran kasusnya. Masing-masing Taruna mendapatkan lembaran kasus sehingga semua bisa membaca bersama-sama.
5. Beri waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk membaca dan mendalami kasus tersebut dan didiskusikan kepada kelompok.
6. Fasilitator memberikan kata kunci pertanyaan untuk memandu dalam membaca dan menganalisis lembaran kasus tersebut: (1) bagaimana kesan anda melihat kasus dala lembaran kasus tersebut? (2) Apakah analisis anda terhadap pelaku, korban dan tindakan Kepolisian? (3) Apakah menurut para Taruna, tindakan Kepolisian sudah berjalan dengan benar? (4) Apakah tantangan-tantangan terbesar dari penanganan kasus tersebut.
7. Setelah diskusi, fasilitator mempersilahkan masing-masing kelompok untuk memberikan analisisnya. Jika masih ada analisis yang perlu dikembangkan, fasilitator bisa memberi pancingan-pancingan pertanyaan tambahan bagi para Taruna.

8. Setelah selesai, fasilitator bisa memberikan tekanan-tekanan analisis yang benar terhadap kasus-kasus yang sedang didiskusikan, terutama kepada wujud peran yang harus diambil oleh Kepolisian.
9. Fasilitator menutup acara perkuliahan dengan beberapa gugahan spirit dan kepercayaan bahwa Polisi sebenarnya mampu menjadi bagian institusi negara yang akan mengawal dan menjaga ruang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

BAHAN BACAAN I

Landasan Peraturan Tentang Peran Polri dalam Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan

Dalam beberapa kasus penanganan konflik dan kekerasan bernuansa keagamaan, Polisi mengeluhkan sikap mereka yang takut dianggap melanggar HAM. Mereka gamang dalam bertindak, karena berada dibawah bayang-bayang ketakutan pelanggaran HAM. Keluhan lainnya terkait dengan ketidakjelasan peraturan dan politisasi isu berkaitan dengan kebebasan beragama. Polisi merasa khawatir tidak mendapatkan dukungan politik, baik dari pimpinan negara dan masyarakat luas. Hal-hal tersebut menjadi hambatan serius bagi kepolisian saat ini.

Berikut adalah landasan konstitusi dan undang-undang yang bisa menjadi sandaran bagi Polri untuk bertindak sebagai pelindung HAM tanpa melihat latar belakang agama, suku, warna kulit, kelompok yang dianut warga:

1.Landasan Konstitusi (UUD 1945)

Perlindungan hak atas beragama, berkeyakinan dan beribadah dijamin sepenuhnya oleh aparaturnegara, karena sesuai dengan Sila Pertama yaitu "*Ketuhanan yang Maha Esa*". Sila tersebut mengandung makna bahwa warga negara Indonesia memiliki semangat toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama, keyakinan yang berbeda-beda atas dasar nilai Ketuhanan. Konstitusi Indonesia UUD 1945 Pasal 28 E menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selanjutnya UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) juga menyatakan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”

Terkait dengan dua pasal dalam Konstitusi tersebut, Aparatur Negara (termasuk Polri) wajib melindungi, memajukan, menegakkan hak asasi warga dalam beragama dan berkeyakinan. Tugas Polri dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan, pelayanan termasuk membantu warga negara dalam membangun dan memelihara tempat ibadah mereka, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan aman dan warga negara Indonesia menjadi pemeluk agama dan berkeyakinan yang baik, tanpa ada paksaan dari siapapun. Konstitusi melarang aparat Polri untuk mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pihak. Kewajiban Polri sebagai aparatur keamanan Negara untuk menjalankan mandat tersebut secara jelas diperintahkan oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal berikut;

Pasal 28 G UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I UUD 1945

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

3.Undang-Undang No. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13 ayat (a) UU No. 8 Tahun 1985 dan Pasal 18 dan Pasal 19 PP No. 18 Tahun 1986Terkait dengan aksi kekerasan yang sering terjadi, kritik tajam sering diberikan kepada Polri, karena Polri dianggap masih kurang tegas, gamang, ragu-ragu dalam menindak pelaku kekerasan oleh Organisasi Masyarakat (atas nama agama, suku ataupun partai politik). Bahkan kerap ada tuduhan bahwa Polisi ada dibelakang aktifitas Ormas tersebut. Padahal, aparat kepolisian memiliki mandat yang cukup jelas dan bisa merujuk pada UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan khususnya Peraturan Pelaksana dalam PP No 18 tahun 1986 yang bisa digunakan untuk membekukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

4.Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Khusus tentang penanganan konflik sosial, UU No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam penanganan konflik sosial, Kepolisian menjadi salah satu aktor penting dalam mengkoordinir kekuatan atas nama negara, termasuk pengaturan permintaan bantuan dari TNI untuk menghentikan kekerasan selama konflik. Peran Polri memang tidak sebesar Pemerintah Daerah yang akan menjadi pemangku utama dalam penanganan konflik. Namun, Polri menjadi salah satu aktor penting yang masuk dalam Satuan Tugas Penanganan Konflik.

Sebagai pedoman bertindak, Polri telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bertindak seperti Peraturan Kapolri sebagai berikut;

- a. Perkap No. 8 Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- c. Perkap No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
- d. Perkap No. 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara
- e. Protap No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki
- f. Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

BAHAN BACAAN II

KONFLIK DAN KEKERASAN BERNUANSA KEAGAMAAN

Oleh: ST. Tri Guntur Narwaya

“..Posisi-posisi sosial yang berbeda saling berjumpa dengan kesadaran akan perbedaan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak memiliki kesamaan. Perbedaan bukan sesungguhnya suatu keberlainan”
(Iris Marion Young)

Pendahuluan

Ingatan sejarah bangsa kita tak lepas dengan berbagai goresan peristiwa ‘konflik’. Peristiwa-peristiwa konflik dalam fluktuasi intensitas yang berbeda hadir dalam setiap perubahan dan perjalanan bangsa ini. Ia menampilkan banyak wajahnya, baik yang berwajah politik luas sampai pada konflik-konflik sosial yang merambah pada struktur kehidupan sosial yang paling kecil. Sebut saja berbagai konflik sosial yang menyeret persoalan sentimen berbau etnis seperti Dayak-Madura, Konflik Ambon, Konflik Aceh dan berbagai konflik yang menyebar di berbagai lini hidup masyarakat baik yang berdimensi struktural vertikal maupun sosial horisontal.¹

Dalam cara pandang tertentu, konflik bisa difahami sebagai realitas keniscayaan yang hadir dalam masyarakat. Cara nalar ini ingin memberikan pandangan bahwa dalam tubuh masyarakat, konflik tidak dimaknai sebagai akibat atau residu (sisa buangan) dari tindakan atau peristiwa tertentu. Konflik hadir justru inhern dalam karakteristik tubuh sosial masyarakat. Secara konseptual, konflik lebih difahami sebagai kerangka kerja yang inhern hidup dalam masyarakat.²

¹ Beberapa gambaran bagaimana konflik itu terjadi bisa dilihat dalam Lambang Trijono, Keluar Dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001; Bdk, Tuhana Taufik, Konflik Maluku, Gama Global Media, Yogyakarta, 2000.

² Lihat, Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik*, Penerbit KOPI kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 5. Pada kenyataannya konflik merupakan unsur fundamental dari konstruksi sosio historis suatu masyarakat bangsa. Konflik sebagai realitas

Setiap entitas masyarakat mengandung dimensi dasar, makna, cara nalar dan kerjanya yang selalu saja berdialektika dengan unsur yang lain. Secara historis, terutama dalam kerangka perubahan sosial, hadirnya 'konflik' merupakan dimensi dan unsur penting dalam kemajuan masyarakat. Pada titik inilah, kerangka konflik secara teoritik bisa difahami.

Namun memang di awal, perlu jeli untuk membedakan apakah 'konflik' yang dimaksudkan adalah sebuah entitas tafsir dari ontologi perkembangan dan eksistensi masyarakat, atau konflik yang dibaca secara awam sebagai dinamika pertentangan dan permusuhan yang merusak sendi-sendi kehidupan kolektif sebagai sebuah bangsa. Kita tentu harus sepakat, yang menjadi kegelisahan dan keprihatinan tentu saja pada poin pengertian kedua. Konflik yang telah mewajah menjadi sebuah peristiwa tindakan yang destruktif bagi peradaban manusia dan masyarakat.

Tentu tidak mudah untuk memahami awal cara pandang ini. Setidaknya untuk pandangan yang meyakini sebaliknya, bahwa dunia masyarakat adalah bangunan unsur yang saling harmonis dan mengafirmasi. Pandangan yang satu ini tak lebih mau mengatakan bahwa masyarakat adalah bangunan sebuah sistem yang terdiri dari dimensi yang saling berintegrasi menuju kesatuan yang harmonis. Konsekuensi dari cara pandang ini tentu saja meletakkan 'konflik' sebagai sesuatu yang merusak atau menghancurkan dari segi-segi harmonis tersebut.³

Segala potensi dan gerak masyarakat yang mengganggu bangunan harmonis itu harus ditiadakan. Maka perbedaan pandangan, konflik pendapat atau keragaman identitas dalam taraf tertentu juga masih banyak dilihat sebagai ancaman bagi harmonisasi. Setidaknya perjalanan bangsa kita dalam masa-masa totalitarianisme Orde Baru⁴ masih bisa menunjukkan gambaran itu. Budaya-budaya keseragaman, penyatuan atas nama identitas tunggal

sosial mampu menjadi mesin pembentuk sejarah masyarakat manusia dan pencipta peradaban berbagai negara bangsa.

³Lihat, George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 123. Dalam pandangan Fungsional Struktural terutama yang dikembangkan oleh pemikir seperti Talcot Parsons, memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang mempunyai karakteristik diantaranya adalah keteraturan. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung dan pada akhirnya sistem akan bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan. Karakteristik yang lain adalah bahwa sistem cenderung akan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

⁴ Diskursus politik 'harmonisasi' dalam masa rezim Orde Baru justru menjadi tempat strategis untuk bentuk lain dari penguasaan dan kontrol masyarakat. Konsep harmonisasi menjadi proses hegemoni negara terhadap ruang publik, yang berarti ada nuansa politik kontrol dalam konsep tersebut. Lihat, Yahya Muhaimin, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.

seperti kebangsaan (nasionalisme) dan juga cara-cara nalar penyeragaman dalam berbagai dimensi menunjukkan watak totalitarianis ini. Sebuah gerak masyarakat harus dibangun atas nama penyatuan tunggal yang kadang terlandasi oleh spirit fatalisme yang imajiner.

Michael Mann dengan sangat apik dan provokatif menunjukkan bahaya dari sikap pembekuan identitas ini. Dalam bukunya *The Dark Sites Democracy: Explaining the Ethnic Cleansing* (2004) menyebutkan bahwa, “*Nasionalisme modern selalu mengagungkan identitas komunal sebagai cara utama untuk membawa orang-orang yang memihak negara. Demokrasi telah mengubah abad ke duapuluh menjadi abad pemberantasan etnik (genosida)*”⁵.

Bahkan karakteristik ini juga sangat nampak pada pandangan dasarnya tentang sistem negara yang dibangun berkait dengan relasinya dengan warga negara. Cara pandang negara integralistik⁶ ini seringkali akhirnya menyeret pada kondisi relasi yang hegemonik dan tersentralisasi dalam cara pandang yang beku. Watak harmonisasi sejatinya kemudian hanya sering menjadi selubung dari sebuah sistem totaliter yang hegemonik.⁷

Tentu kita akan bisa lihat, sistem ini tak memberi peran akan lahirnya dinamika perbedaan dan pluralitas pandangan politik. Demokrasi kemudian menjadi hanya simbol dan pepesan kosong karena ujungnya adalah pemusatan kekuasaan tunggal. Pluralisme dan keberagaman juga sekedar menjadi artefak tontonan yang tidak mempunyai greget substansinya. Jika persoalan fenomena konflik secara teoritis difahami dalam cara pandang yang fungsional maka sekurangnya ada beberapa kelemahan mendasar.

Pertama, tentu saja cara pandang ini seringkali menghindar untuk melihat dimensi sejarah (ahistoris). Masyarakat cenderung dibaca menjadi suatu struktur yang statis dengan logika kemungkinan integrasi dan konsensusnya. Pandangan fungsional ini dianggap gagal membaca problem konflik dalam

⁵ Kutipan gagasan Michael Mann diambil dari bukunya Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Penerbit Obor, dan KITLV, Jakarta, 2007, hal. 242 - 242.

⁶Lihat, Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, bdk. Lihat, David Bouchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM bekerjasama dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jakarta, 2007.

⁷Dalam pengertian tertentu, ketika ‘harmonisasi’ dipertentangkankan secara biner dengan ‘konflik’ sering menjadi politik penyeragaman dan kontrol negara yang bisa juga dikategorikan dalam bahasa John B Thompson sebagai ‘Politik standarisasi’. Landasan fikirnya menafikan adanya ‘kontradiksi’. Ia menghindari segala kecenderungan analisis yang meletakkan ‘perspektif konflik’ yang akrab dalam khasanah perspektif Marxian. Lihat, Tri Guntur Narwaya, *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*, Penerbit Resistbook, Yogyakarta, 2010, hal. 166.

masyarakat secara efektif, karena yang ia lihat hanya semata bahwa konflik sebagai sesuatu dimensi yang merusak dan mengganggu.

Kedua, pandangan fungsional juga memberi bias konservatisme. Cenderung menjaga kemapanan dari status quo yang ada. Nalar ini sama halnya lebih berhati-hati untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam masyarakat, karena setiap perubahan akan dianggap merusak dan mengganggu harmonisasi sistem yang sudah ada sebelumnya.

Ketiga, pandangan sistem semacam ini tentu saja menyembunyikan apa yang disebut sebagai 'kepentingan' atau 'kekuasaan'. Di banyak pengalaman sistem ini bekerja, kekuasaan dianggap sebagai sebuah barang final yang tak lagi bisa diotak-atik lagi. Pada kecenderungan yang lebih abstrak, pandangan fungsional cenderung naïf, ambigu dan lebih berwatak 'tautologis' yang tak memberikan makna apapun.⁸

Konflik bukanlah entitas yang berdiri tunggal. Ia menjadi persoalan yang harus dipecahkan menyangkut banyak dimensi. Ia bisa beranjak dari kesadaran membangun kehidupan berbangsa dan bernegara bersama. Ia bisa juga menyentuh dengan cara penghargaan atas nilai hak dasar manusia, namun ia juga bisa dibaca sebagai terkait dengan persoalan cita-cita demokrasi, atau bahkan yang lebih pragmatis bisa amat berkait dengan kepentingan dalam rangka menjaga kohesifitas dan solidaritas warga negara dalam mengawal cita-cita kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa.

Menjernihkan Cara Pandang Memahami Konflik Berbasis Agama

Harus cukup hati-hati dan bijaksana untuk membaca sebuah persoalan konflik yang kemudian sering dilabeli dalam kategori '*konflik kekerasan berbasis agama*'. Kecuali mengupas dan menganalisis sejauhmana sebuah konflik bisa dikategorikan sebagai konflik agama, bukanlah sebuah analisis sederhana. Ia akan menyangkut banyak pertimbangan. Di sisi lain kegagalan dan kekeliruhan dalam memberi kesimpulan tersebut akan selalu mendorong eskalasi kerumitan sendiri di realitas yang lebih kongkrit.⁹

⁸Lihat, George Ritzer & Douglas J. Goodman, *ibid*, hal. 147.

⁹Dalam realitasnya banyak dimensi dan variabel bertumpang tindih sehingga kadang secara awam biasa amat sulit membedakan apakah sebuah konflik yang terjadi bisa terkatagorikan sebagai konflik berbasis agama atau semata ia hanya konflik biasa dengan basis persoalan yang berbeda. Namun pada kenyataannya basis kepentingan dan juga isu yang dihembuskan dalam memperluas konflik juga bisa berubah. Kasus yang amat nampak adalah dalam kasus Konflik Maluku yang sarat dengan transformasi dan kelindan berbagai kepentingan yang saling menggunakan. Beberapa kecenderungan itu secara resmi pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh agama yang menyatakan sikap kepada Presiden Abdurrahman Wahid "*Dari keseluruhan fakta dan kronologis dan analisis soal Maluku yang berlangsung selama 20 bulan, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi politisasi agama untuk menciptakan konflik horizontal sebagai upaya*

Dalam konteks kesejarahan, konflik yang menyeret problem nilai agama sebesar Perang Salib saja, masih banyak yang melihat bahwa problem dasar yang memicu tak semata pada persoalan agama. Perang tersebut sudah berelasi dan berkelindan dengan problem kekuasaan, kepentingan baik politik maupun ekonomi yang menyejarah. Pada banyak hal masih terus terbawa hingga hari ini sebagai prasangka dan dogma. Seperti yang saya kritisi terhadap fenomena Perang yang berbasis agama itu. Ia adalah sebuah gambaran tampilan agama yang terburuk,¹⁰ karena setiap agama tentu tidak sedang ingin mengajarkan untuk saling meniadakan satu manusia dengan manusia yang lain.

Demikian juga tentu kita tidak lupa berbagai peristiwa sosial besar seperti konflik Poso, Ambon dan beberapa konflik sosial lainnya di Indonesia. Juga termasuk berbagai gejala ketegangan sosial yang menyeret problem kekerasan yang mengatasmakan persoalan nilai keyakinan dan keagamaan; seperti isu Ahmadiyah, perusakan tempat-tempat pesantren kelompok yang dicurigai sebagai Syiah ataupun pelarangan-pelarangan tempat beribadah yang disertai dengan mobilisasi kekerasan berbau agama.

Semua itu adalah deretan peristiwa yang mengemuka dan kemudian meluas. Seolah membentuk opini umum bahwa itu adalah konflik bernuansa keagamaan. Diskursus itu berkembang dan bahkan menjalar. Memicu kesadaran masyarakat untuk meyakini bahwa ia memang benar-benar problem agama. Media massa disinyalir menjadi pendorong perluasan diskursus tersebut. Artinya, sadar atau tidak sadar, media juga turut menyumbang terhadap bias kepentingan dalam mereproduksi diskursus tersebut.¹¹

Satu hal yang juga masih sering menyisakan problem penting, bahwa eskalasi dan perluasan konflik hingga hari ini justru makin berkembang, saat setiap orang sudah memasuki era yang disebut sebagai era demokratisasi. Demokrasi secara de facto adalah proses historis dari berbagai tuntutan akan semakin dihargainya aspek dimensi hak-hak warga masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi juga diyakini menjada wahana dan ruang proses keberagaman berbagai keragaman yang dibangun melalui spirit penghargaan yang lain.

mendorong perubahan sosial, perebutan hegemoni politik dan ekonomi, maupun sparatis dengan cara-cara kekerasan". Lihat, Pokok-pokok pikiran umat Islam Maluku untuk disampaikan kepada Presiden RI di Jakarta, tanggal 2 September 2000.

¹⁰Lihat, Karen Armstrong, *Perang Suci: Kisah Detail Perang Salib, Akar Pemicunya dan Dampaknya terhadap Zaman Sekarang*, Penerbit Serambi, Jakarta, 2011, hal. 12.

¹¹Maka kemudian sebagai solusi banyak pendekatan tersendiri dalam jurnalisme media, terutama pada peliputan konflik seperti dalam metode 'jurnalistik damai'. Ia bagian dari tuntutan kegelisahan untuk mbingkai media menjadi salah satu bagian mediator konflik, terutama menjernihkan fakta dan persoalan secara seimbang.

Setidaknya itulah cita-cita eksplisit dari apa yang disebut sebagai proses demokratisasi. Namun kenyataan hari ini memang tidak bisa dipungkiri. Lahan dan sarana ini tercabik-cabik oleh banyak peristiwa yang anti demokrasi, meskipun para pelakunya selalu mengatasnamakan demokrasi. Ironi dan paradoks problem tersebut, hingga hari ini masih menjadi bahan perdebatan panjang. Gerry Van Klinken dalam bukunya *'Perang Kota Kecil'* melihat berbagai fenomena konflik komunal Indonesia. Dalam salah satu kesimpulannya, ia juga secara tersirat menegaskan ironi persoalan ini.

*"Dalam hal ini rakyat Indonesia perlu memulai debat yang lebih serius dari yang pernah ada mengenai bentuk demokrasi seperti apa yang mereka inginkan. Beberapa suara dalam debat tersebut tentu akan menyatakan mereka dari dulu telah melihat bahwa demokrasi akan member kesempatan besar bagi sentimen-sentimen primordial yang berpotensi menimbulkan kekerasan."*¹²

Era transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang sedang berjalan hari ini, ternyata juga harus tetap harus kita baca terus-menerus secara kritis. Demokrasi bisa jadi juga menjadi pisau bermata dua. Demokrasi tidak semerta-merta menjawab apa yang dimaknai sebagai penyelesaian problem kebangsaan.¹³

Ruang liberalisasi secara prinsip membuka kebebasan ekspresi yang menjadi satu prinsip demokrasi, tetapi liberalisasi demokrasi juga memungkinkan berbagai kepentingan mengatasnamakan apapun baik (suku, agama, kepentingan, dll) untuk berkontestasi. Pada titik ini, maka problemnya tak lagi memusat pada persoalan negara semata, tetapi terfragmentasi dan menyebar pada berbagai hal. Konflik kepentingan, kekerasan agama, konflik etnis dan berbagai letupan kekerasan kian hari justru bertambah. Zaki Mubarak dalam catatan penting dibukunya, *'Geneologi Islam Radikal di Indonesia'*,¹⁴ juga secara kritis menggambarkan proses relasi ini.

"Demokratisasi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi kita, sebuah arena terbuka, di mana berbagai spektrum aspirasi, ekspresi, dan gerakan dari berbagai macam-macam entitas dapat mengaktualisasikan diri secara bebas dan maksimal di dalamnya, termasuk semakin terbuka lebarnya public sphere bagi berbagai pemikiran dan aktivisme keagamaan"

¹²Lihat, Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Penerbit Obor kerjasama dengan KITLV Jakarta, 2007, hal. 243.

¹³Lihat, Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah : Demokratisasi dan Konflik Nasional*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2003.

¹⁴Lihat, M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia : Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007. Catatan yang lain yang hampir serupa adalah buku Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Nalar pembacaan terhadap berkembangnya konflik yang hidup dalam masa transisi Indonesia ini juga hampir sama dibaca secara kritis oleh Jacques Bertrand dalam bukunya *'Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia'*. Ia ingin memperlihatkan sebuah relasi antara struktur kelembagaan demokrasi, terutama dalam bingkai pembentukan wajah kebangsaan dengan berbagai masalah konflik yang muncul.

Ada relasi yang amat penting dari transisi demokratisasi yang berjalan, terutama era 90'an. Terbukanya berbagai saluran politik yang juga memungkinkan lahirnya berbagai respon ekspresi kepentingan yang muncul baik dalam taraf nasional maupun lokal. Bertrand juga menyoroti transisi era otoritarianisme Orde Baru ke era demokrasi dan berbagai konsekuensi yang berkembang.

*"Kekerasan etnis cenderung terjadi selama masa-masa selama berlangsungnya perundingan ulang mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga negara. Ada kecenderungan gelombang naik atau intensifikasi kekerasan berlangsung secara kebetulan bersamaan dengan titik-titik simpang kritis reformasi kelembagaan. Titik-titik simpang ini bisa terjadi sebagai tanggapan terhadap ketegangan yang terbentuk dalam lembaga-lembaga dan model kebangsaan model warisan masa lalu"*¹⁵

Pada dasarnya yang juga ingin disampaikan dalam catatan Bertrand barangkali juga ingin mengatakan, bahwa peran negara dalam arti yang lebih luas juga sangat penting untuk dibaca. Negara memang dalam konteks kesejarahannya selalu menjadi ruang yang diperebutkan untuk membangun ekspresi kepentingan dan juga keberlangsungan politik identitas. Sulit untuk bisa mengeluarkan problem agama steril dari variabel politik ini.

Bahkan, dalam banyak hal, hegemoni kepentingan politik justru banyak berperan menjadi arus utama dalam lahirnya berbagai persoalan konflik dalam berbagai skala intensitasnya. Jalan menuju demokrasi liberal, dimana agama adalah penanda identitas, bagaimanapun lika-likunya tidak bisa terhindar dari gerbang politik keagamaan.¹⁶

¹⁵Lihat, Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 7. Analisis Bertrand tak terbatas pada konflik etnis tetapi juga melihat potensi kecenderungan pola relasi yang sama pada konflik-konflik yang menyertakan masalah agama.

¹⁶Lihat, Nadher Hashemi, *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal : Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 2. Thesis penting dari Nadher Hashemi ini juga mengenai dari berbagai pemikir yang sangat intens percaya ada relasi yang erat antara perubahan politik dan dinamika persoalan agama termasuk dalamnya adalah dinamika ketegangan-ketegangan ekspresi mengatasnamakan agama.

Namun analisis terhadap relasi agama dan demokrasi pun tidak bisa diletakkan pada cara pandang tunggal. Contoh gerakan islamisme di Indonesia dalam merespon diskursus tentang demokrasi pun, yang semula secara *stereotype* dianggap tunggal, ternyata memiliki dimensi lapisan persoalan yang beragam.¹⁷ Terdapat berbagai pandangan sikap mereka terhadap demokrasi.

Politik dan agama sebagai sebuah entitas, masing-masing sulit untuk dipisahkan meskipun memiliki lapis-lapis dinamikanya sendiri yang tidak monolitik.¹⁸ Karena dalam unsur dimensi keduanya masing-masing memiliki perjalanan sejarah yang saling beriringan. Seperti komentar Mahatma Gandhi bahwa, “mereka yang berpikir bahwa agama dapat dipisahkan dari politik tidak memahami baik agama maupun politik”.¹⁹

Namun barangkali gagasan Gandhi ini tidak seluruhnya bisa disepakati. Banyak pemikir lain yang melihat juga bahwa pemisahan ‘politik’ dan ‘agama’ ini sejatinya justru sudah berlangsung sejak lama, baik dalam agama-agama muslim atau juga non-muslim.²⁰ Perdebatan posisi pandangan ini memang hingga hari ini masih beragam. Harus diakui pula bahwa perbedaan cara pandang ini dalam taraf tertentu seringkali langsung atau tidak langsung juga menyeret pada dinamika ketegangan dan konflik di Indonesia.²¹ Dalam konteks sejarah pengalaman Indonesia sendiri, sejak kemerdekaan hingga hari ini kita tidak bisa menutupi bahwa problem ketegangan pandangan ini masih berlangsung.

¹⁷Lihat, Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan : Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, Penerbit Kanisius kerjasama dengan Impulse Yogyakarta dan IAIN Sunan Ampel, 2009.

¹⁸Lihat, Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat : Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, 2010, hal. 84. Untuk memahami kaitan agama dan politik, menyentuh tiga mekanisme pokok yang menentukan; Pertama, fungsi agama sebagai ideology. Agama memberikan kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial; Kedua, agama sebagai faktor identitas; Ketiga, agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial.

¹⁹Lihat Nadher Hasheni, *Ibid*, hal. 217.

²⁰Lihat, Deepa Kumar, *Islam Politis Sebuah Analisis Marxis*, Penerbit Resistbook, Yogyakarta, 2012.

²¹Konflik yang dimulai dari pluralitas cara baca, keberagaman tafsir dan juga gesekan pandangan mengenai isu-isu keagamaan bisa amat dirasakan dalam kontestasi politik di Indonesia. Berbagai aliran, mazhab, pemikiran dan bahkan kepentingan-kepentingan agama yang beragam sering secara langsung dan tidak langsung menjadi tema besar dalam persoalan keagamaan di Indonesia. Meskipun kita juga harus cukup hati-hati untuk bisa membedakan apakah ia bisa dimaknai sebagai ‘konflik agama’ atau konflik yang mengatasmakan agama yang seringkali sejatinya hanya merupakan bentuk lain dari ekspresi politik semata dan bahkan dalam taraf tertentu menjadi bagian dari sebuah kepentingan ekonomi politik negara. Kasus seperti yang pernah terjadi dalam persoalan ‘Komando Jihad’ di Indonesia seringkali terbukti menjadi bagian dari kelindan kepentingan ekonomi politik kekuasaan. Lihat, Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen : Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, Penerbit Pusham UII, Yogyakarta, 2012.

Demokrasi, pluralisme, keberagaman dan toleransi dalam menata tata hidup bernegara dan berbangsa menjadi wacana yang sering diusung. Terutama bagi kekuatan yang amat memperdulikan proses demokrasi bagi penataan kepentingan bersama. Sebaliknya, kelompok dan kekuatan yang lain dengan berbagai manifestasi sikap dan tindakan memang lebih melihat jalan perjuangan politik yang lebih keras melalui manifestasi kekerasan. Relatif hampir sebagian dari mereka mencurigai dan dalam banyak hal tidak mempercayai konsep-konsep seperti pluralisme, toleransi dan dalam taraf yang berbeda-beda menolak klaim demokrasi.

Memang kajian yang lebih komprehensif terhadap keberagaman dinamika ini harus secara kritis bisa menemukan berbagai perjalanan fakta. Hal ini perlu dilakukan untuk member kesimpulan, sehingga tidak hanya terjebak pada *stereotype* dan manipulasi diskursus yang kemudian mudah menjadi komodifikasi bagi kepentingan-kepentingan tertentu, yang memang sering menggunakan celah semacam ini.²²

Manipulasi diskursus ini seringkali justru akan semakin menyesatkan dan mengganggu usaha untuk menemukan jalan bagi berbagai penyelesaian ketegangan dan konflik. Ruang dialog yang lebih terbuka dan egaliter tentu tidak akan bisa terjadi, jika bahan acuannya lahir dari diskursus yang sudah banyak mengalami penyimpangan. Perjernihan cara baca adalah upaya penting dalam langkah awal untuk membangun analisis dan respon terhadap berbagai problem konflik. Terutama yang menyertakan berbagai sentimen yang amat sensitif seperti agama.

Analisis Anatomi Konflik dan Kekerasan (Berbasis) Agama

Individu, kelompok atau masyarakat hampir sama terdiri dari bagian-bagian unturnya yang sejatinya saling berdinamika membentuk, mengafirmasi, menegasi satu sama lain. Juga membentuk mater-materi perkembangan yang baru. Di titik ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Karl marx, Ibnu Khaldun, Max Weber, ataupun juga pemikir struktural seperti Ralf Dahrendorf. Konflik adalah hakiki dalam tubuh sosial masyarakat dan ia berkembang dalam sejarah kehidupan masyarakat sebagai unsur penting yang tidak bisa ditiadakan.²³

²²Riset yang lebih mendalam dengan pendasaran fakta, data dan analisis yang komprehensif akan membantu untuk membuka kajian-kajian tentang konflik lebih kritis dan mendalam. Pengalaman survey Gallup World Poll yang dikerjakan hampir lima tahun dengan lebih 35 negara tentang pendapat opini umat muslim dengan berbagai isu dan topic penting menjadi salah satu cara untuk mengungkap kejelasan persoalan. Lihat, Jihn L. Esposito & Dalia Mogahed, *Saatnya Muslim Bicara: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM dan Isu-isu Kontemporer Lainnya*, Penerbit Mizan, Bandung, 2008.

²³Lihat, Novri Susan, *Ibid*, hal. 8.

Meletakkan konflik sebagai sebuah unsur hakiki dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan pandangan konflik sebagai yang lebih bercitra buruk, tentu saja dua hal yang berbeda. Pada poin kedua, biasanya konflik kemudian dihindari dan ditiadakan. Padahal dalam dimensi yang paling dasar, manusia tidak bisa keluar dari betapa unsur konflik ini akan hadir dalam setiap dimensi hidup manusia dan sosial di manapun. Maka kemampuan individu, atau masyarakat dalam mengelola konflik ini akan menjadi kekuatan konstruktif bagi sebuah bangunan peradaban dalam sebuah komunitas tertentu.²⁴

Poin penting yang sebenarnya harus digaris bawahi dalam masalah modul ini sejatinya lebih fokus pada konflik yang sudah begitu mengancam kehidupan martabat manusia. Kita akan bisa melihat masalah itu dalam kecenderungan konflik yang begitu sudah diambang batas. dan tak lagi menghargai harkat manusia sebagai manusia. Kita bisa melihat pada proses perang, kekerasan, pembunuhan, dan segala bentuk kriminalisasi konflik yang mengancam hidup dan peradaban manusia.

Nilai etis dan aksiologisnya harus diletakkan pada dimensi kemanusiaan. Jika ia hanya dibaca sebagai peristiwa terpisah dari itu, maka upaya memahami konflik sering akan melahirkan ‘pepesan-pepesan kosong’ yang justru berbahaya. Apalagi kita sadari dasar ontologis ini untuk menguatkan bahwa dimensi mengatasi konflik tak hanya berwatak instrumentalis semata.

Perlu pendasaran nalar yang melebihi hanya soal metode, tetapi memasuki dasar nilai falsafah manusia. Setiap konflik yang diluar batas kemanusiaan tentu saja akan mengancam diri manusia lain (the others) sebagai makhluk manusia. Apapun dalil dan credo alasan yang dibangun, setiap konflik akan melibatkan ancaman terhadap harkat kemanusiaan orang lain.²⁵

Sikap pandangan semacam ini salah satu yang harus menjadi pilar pendasaran dari setiap perbincangan tentang konflik dengan segala permasalahannya. Sebelum kita memasuki spesifik tentang cara baca dan

²⁴Seperti ucapan klasik sosiolog seperti George Simmel bahwa “...konflik itu sebenarnya menunjuka pada dirinya sebagai suatu faktor positif...bisa disebutkan dalam banyak kasus sejarah sesungguhnya penyatuan dipengaruhi oleh faktor positif konflik” Lihat, George Simmel, *The Sociology of Conflict*, *American Journal of Sociology* 9, 1903, hal. 490 - 491. Yang dikutip oleh Novri Susan, *Ibid*, hal. 60.

²⁵Dalam falsafah Emmanuel Levinas menyebut sebagai kesadaran sikap pada orang lain. Seperti gagasan Levinas yang disadur oleh Josef Tischner bahwa “..aku (self) tidak hanya terhubung dengan orang lain (the other), tetapi harus mengandaikan tanggungjawab atas orang lain itu dan siap menanggung konsekuensi keputusan dan sikap seperti itu” Lihat, Ryszard Kapuscinski, *The Other*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012. Bisa juga lihat konsep pandangan Levinas tentang “*Enigma wajah orang lain*’ sebagi prinsip menghargai martabat paling mendasar manusia. Lihat, Thomas Hidyta Tjaya, *Enigma Wajah Orang lain: Menggali Pemikiran Emanuel Levinas*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.

analisis anatomi konflik berbasis agama, kita perlu untuk menjabarkan pilihan cara analisis yang dikembangkan berbagai mazhab dan perspektif teoritik. Langkah ini akan cukup membantu nanti untuk bisa menjadi pintu analisis bagi detail-detail pengamatan fenomena konflik yang terjadi. Minimal ada tiga kecenderungan tiga cara pandang tradisi pendekatan yang biasa dibangun dalam membaca konflik.²⁶

Pertama; tradisi positivis, yang melahirkan cara pandang makro tentang konflik yang juga kerap disebut sebagai sosiologi konflik struktural. Ciri utama dari mazhab ini adalah adanya generalisasi konflik yang berlaku secara universal dan juga melihat konflik sebagai dinamika gerakan struktural.

Kedua; pendekatan humanis, yang keluar dari pendekatan makro dengan memilih sebuah tradisi pendekatan mikro dalam memandang konflik. Kunci analisis diletakan pada interaksi simbolis yang menekankan individu, simbol (bahasa dan makna), dan dunia sosial. Teori konstruksi sosial dan fenomenologi bisa diletakan dalam mazhab tradisi humanis ini.

Ketiga; tradisi kritis, yang banyak meletakan pada tugas emansipasi untuk membaca pada aspek hubungan ideologis dan dominatif antara penguasa dan masyarakat. Teori kritis lebih membaca konflik sebagai persoalan yang tidak lepas dengan kepentingan ideologi kekuasaan.

Tetapi di luar dari ketiga pendekatan umum tersebut, sekarang justru mulai banyak dikembangkan berbagai pendekatan yang tak lagi terbatas satu atau dua pendekatan, tetapi mengembangkannya dalam berbagai penggabungan pendekatan (multidisipliner). Biasanya, cara ini dikembangkan sebagai bagian untuk menjawab berbagai kebutuhan yang kongkrit dalam penanganan konflik.

Namun dalam catatan dari Novri Susan,²⁷ ada benang merah dari sekian pendekatan tersebut yang bisa ditarik simpul persamaannya. *Pertama*; bahwa setiap orang mempunyai angka dasar kepentingan, mereka ingin dan mencoba mendapatkannya, masyarakat selalu terlibat dalam situasi yang diciptakan oleh keinginan-keinginan dari setiap orang dalam meraih kepentingannya.

Kedua, pusat pada perspektif teori konflik secara keseluruhan adalah satu pemusatan perhatian pada kekuasaan sebagai inti hubungan sosial.

Ketiga, aspek khusus teori konflik adalah bahwa nilai dan ide-ide dilihat sebagai instrumen yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial dalam mempermudah pencapaian tujuan mereka sekaligus merupakan cara-cara pendefinisian satu identitas masyarakat keseluruhan dan tujuannya.

²⁶Lihat, Novri Susan, *Op.Cit*, Hal. 54 - 94.

²⁷Lihat, Novri Susan, *Ibid*, hal. 110 111.

Tabel 1
Contoh Beberapa Aliran Sosiologi Konflik²⁸

SOSIOLOGI KONFLIK	METODOLOGI	TEORI	KUNCI ANALISIS
Mazhab Positivis	Bebas nilai, universal, ahistoris, makro dan objektif	Konflik Struktural: dialektika konflik wewenang, fungsi konflik, konflik incompatible goal	Melihat dinamika dan pergeseran kelembagaan dari struktur sosial, konflik perebutan wewenang
Mazhab Humanis	Tidak bebas nilai, kontekstual, mikro dan makro, penafsiran bahasa	Interaksi simbolis dan konflik pemaknaan, konstruksi sosial konflik, konstruksi sosial perdamaian	Simbol dalam tindakan, makna subjektif, kesalahan paham makna, wacana/ bahasa, dialektika kenyataan sosial
Mazhab Kritis	Emansipasi (pembebasan), dominasi, kekuasaan	Dominaasi struktural, fungsi komunikasi, dominasi, reproduksi dominasi sistem posisi	Dominasi kekuasaan, posisi dalam struktur sosial, eksistensi ruang public, dan masyarakat sipil

²⁸Diambil dari Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hal. 110.

Mazhab Eklektik	Pembebasan dominasi dan kontekstual	Kritik dominasi struktural dan kepentingan bahasa	Dominasi wacana dan kepentingan elit kekuasaan, Pemaknaan dan gerakan sosial, eksistensi ruang publik dan dialektika wacana
Analisis Konflik Multidisipliner	Pragmatis : sesuai kebutuhan dan kepentingan	Teori konflik dan kekerasan, transcend approach Galtung	Variasi kunci analisis dari mazhab-mazhab kajian konflik

Tentu saja, berkaitan dengan berbagai lapis persoalan yang sering dibawa dalam problem konflik yang berdimensi agama, maka berbagai multi pandangan pendekatan ini bisa amat membantu. Tak sekedar sebagai kebutuhan agar analisis kemudian dianggap lengkap, namun juga diharapkan bisa memberi keluasan cara pandang yang berguna bagi penyelesaian masalah selanjutnya. Selanjutnya akan semakin ditemukan titik-titik perpaduan yang mempermudah setiap orang untuk menggunakannya sebagai kunci panduan.

Bisa jadi dua atau lebih kasus konflik berbasis agama yang kelihatan serupa tetapi sejatinya memiliki tingkat keragaman variabel yang berbeda. Kekerasan-kekeraan dan konflik sosial yang sering mengatasnamakan agama bukanlah sebuah fenomena yang ahistoris, beku, pejal dan monolitik. Karen Amstrong dalam bukunya *'Sejarah Tuhan'* cukup banyak memberikan pandangan penting untuk menganalisis problem kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“Terjadinya ekspresi kekerasan agama, sesungguhnya terkait dengan beberapa faktor : Pertama, kekerasan bukan merupakan fenomena monolitik dan mandiri; Kedua, kekerasan muncul sebagai fenomena sosial politik; Ketiga, kekerasan terjadi karena kondisi internal penganut agama; Keempat, kekerasan agama memerlukan solidaritas dan militansi kelompok; Kelima, kekerasan memiliki basis sistemik dalam sejarah survivalitas agama; Keenam, ekspresi

kekerasan lazim terjadi karena berkaitan dengan perasaan superioritas diri atas pihak lain; Ketujuh, kekerasan merupakan ekspresi ketaatan terhadap Tuhan; Kedelapan, kekerasan juga terkait dengan persepsi para pemeluk agama tentang Tuhan yang diyakininya.²⁹

Menambahkan dari cara analisis di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa sebab-sebab dari hadirnya konflik dan kekerasan agama tersebut berasal dari unsur dalam dalam epistemologi penafsiran keagamaan yang ada. Tidak semata sebagai distorsi penyimpangan dari teks, tetapi menjadi bagian habitus tradisi yang secara sadar atau tidak direproduksi terus menerus. Pemikir seperti Nelson-Pallmeyer bahkan mengajukan tesis yang cukup kritis bahwa kekerasan relijius (agama) yang dilakukan oleh penganut agama-agama monoteis (Yudaisme, Kristianisme dan Islam) tidak semata-mata masalah 'distorsi' dalam penafsiran teks-teks suci.³⁰ Kekerasan itu lebih berakar dalam tradisi kekerasan seakan-akan Tuhan menghendaki kekerasan dan hal ini lalu dianggap benar.

Analisis dan Pola Pemetaan Konflik

Pada tingkatan praktis, situasi konflik apapun sering memaksa semua orang untuk tak berhenti pada perenungan teoritik semata, tetapi sebuah daya penanganan yang komprehensif dengan memberikan langkah-langkah yang tepat. Namun sebelum masuk pada tataran yang paling praktis tersebut, tentu kerangka rujukan langkah harus bisa dipertimbangkan dengan matang. Ada berbagai bentuk pegangan analisis cara pemetaan konflik dari berbagai pengalaman yang telah terjadi.

Pola pemetaan ini tentu bukan sebuah rumus mati, tetapi harus selalu dikontekstkan dengan kebutuhan yang khusus dengan pertimbangan-pertimbangan yang membumi. Pendekatan analisis semacam ini biasa kerap disebut sebagai analisis yang lebih bersifat pragmatis. Pemetaan konflik secara praktis pula akan memberikan sebuah gambaran analisis yang terstruktur terhadap sebuah kejadian konflik tertentu dan juga dalam moment waktu tertentu pula.

Pemetaan ini bukan merupakan jawaban tetapi sebuah skema yang lebih bersifat indikatif ketimbang membangun kesimpulan akhir. Salah satu gambaran bentuk pola pemetaan ini bermacam-macam. Satu contoh bisa kita berikan dari hasil gagasan Hugh Miall,³¹ dengan beberapa langkah pemetaannya :

²⁹Lihat, Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan : Kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan dalam Agama-agama Manusia*, Penerbit Mizan, Bandung, 2012.

³⁰Lihat, Haryatmoko, *Ibid.*, hal. 85.

³¹Lihat, Hugh Miall, *Conflict Transformation : A Multi Dimentional Task (Berghof Handbook*

1. Siapa yang menjadi inti pihak bertikai? Apa subkelompok internal mereka dan pada apa mereka tergantung?
2. Apa yang menjadi persoalan konflik? Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai, hubungan) dan kebutuhan?
3. Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai? Apakah ada ketidaksimetrisan kualitatif dan kuantitatif?
4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak-pihak yang bertikai?
5. Apakah perilaku akhir-akhir ini pihak yang bertikai (apakah konflik dalam fase eskalasi atau fase deeskalasi) ?
6. Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai? Pada tingkat elit dan individual, apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan, dan kelemahan relative mereka?

Model lain yang amat cukup bisa membantu pemetaan konflik pernah dikembangkan dalam gagasan sosiolog dari United Nations-University of Peace, yakni Amr Abdalla. Sebuah cara pendekatan multidisipliner yang lebih utuh lebih akan membantu siapa saja untuk minimal mampu membangun kesiapan dalam penanganan konflik. Gagasan Amr Abdalla³² bisa dirumuskan dalam SIPABIO sebagai berikut :

1.S (SOURCE)

Ingin menunjukkan bahwa konflik-konflik bisa bersumber masalah yang berbeda. Pada titik awal ini sumber konflik harus bisa ditemukan. Apakah ia bersumber dari konflik identitas, konflik interpretasi atau konflik dengan latar sumber yang berbeda.

2.I (ISSUE)

Poin ini ingin menunjukkan bahwa isu akan menunjukkan pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak saling berjalan di antara pihak-pihak yang bertikai. Isu ini tentu bisa dikembangkan oleh siapa saja baik yang sedang bertikai, maupun mereka yang tidak terkena relasi langsung dengan konflik. Isu penting ditangkap untuk bisa memahamai sejauh mana eskalasi atau deeskalasi persoalan itu mulai berkembang.

of Conflict Transformation). Diakses 3 Agustus 2012 dari <http://www.berghof-handbook.net/uploads/download/boege-handbook.pdf>.

³²Amr. Abdalla, *Say Peace : Conflict Resolution Training Manual for Muslim Communities*, The Graduate School of Islamic and Social Sciences, Virgiana, USA, 2002. Telah dikutip dalam bukunya Novri Susan, *Ibid*, hal. 98 - 99.

3.P (PARTIES)

Apa yang disebut parties (pihak) adalah mereka yang memang dikategorikan sebagai pihak-pihak yang bertikai baik mereka yang menjadi pelaku utama, mereka sebagai pihak sekunder ataupun mereka yang tidak secara langsung berelasi dengan konflik. Analisis pihak-pihak ini tidak semata pada konteks person (agen) tetapi bisa menyangkut komunitas atau lembaga.

4.(A) ATTITUDES/ (SIKAP)

Apa yang dimengerti sebagai sikap adalah perasaan dan persepsi dan pandangan para pelaku konflik yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Misal beberapa pandangan konflik di pedesaan dan perkotaan (urban) tentu mengandung beberapa perbedaan mengenai pola dan bentuknya. Konflik yang bersumber pada persoalan agama dan konflik yang berasal dari persoalan ekonomi tentu juga akan mengandung pola-pola yang berbeda.

5.(B) BEHAVIOR

Poin ini ingin menunjukkan bagaimana sebuah konflik menunjukkan tindakannya. Dalam pengertian lain bahwa bentuk-bentuk tindakan konflik semacam apa. Apakah kecenderungan memakai pola-pola kekerasan atau tidak.

6.(I) INTERVENTION

Apakah dalam sebuah konflik tertentu ada intervensi dan keterlibatan pihak-pihak luar yang lebih netral untuk ikut menyelesaikan konflik. Banyak pengalaman konflik yang sudah berjalan dan akskalasi meluas dibutuhkan berbagai mediator (pengenah) atau juru runding damai yang memang berasal dari pihak-pihak yang mempunyai otoritas yang dipercaya oleh masing-masing pihak.

7.(O) OUTCOMES

Poin ini mengandung pengertian yakni dampak yang ditimbulkan dari berbagai tindakan pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini tentu tidak tunggal. Dampak akan selalu membangun mata rantai dampak, artinya setiap dampak yang satu juga akan berkontribusi pada pengaruh tindakan yang lain.

Langkah pola pemetaan konflik ini tentu dalam mekanisme kerjanya juga harus didukung oleh banyak kemampuan analisis. Kehadiran berbagai analisis penunjang amatlah penting dan tak terbatas pada skop analisis yang terbatas. Pengembangan ini juga secara tidak langsung juga akan membantu dalam mengembangkan pola pemetaan yang barangkali perlu untuk dipertajam.

Dalam pendekatan yang lebih dinamis, interaksi analisis yang lebih struktural harus juga bisa dibantu dengan berbagai pendekatan yang kultural. Kelemahaman pada perspektif yang satu bisa ditambahkan dengan perspektif yang lain. Setidaknya ini menggarisbawahi kunci penting, bahwa banyak belajar dari pengalaman konflik selama ini, telah menyimpulkan bahwa 'problem konflik tidaklah berwajah tunggal dan monolitik'. Kebutuhan pendekatan yang komprehensif, holistik dan multidipliner amat penting dilakukan.

DAFTAR BACAAN

- Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*, Penerbit KataKita, Depok, 2009.
- Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*, Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Press Ponorogo, 2009.
- Amin Maalouf, *In the Name of Identity*, Penerbit Resistbook, Yogyakarta, 2004.
- Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, Penerbit Ircisod, Yogyakarta, 2012.
- David Bouchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM bekerjasama dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Jakarta, 2007.
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Felix Baghi (ed), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, Penerbit Ledalero, Maumere, 2012.
- Frans Husken & Huub de Jonge (eds.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia, 1965 - 1998*, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Obor dan KITLV Jakarta, 2007.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Hannah Arendt, *Teori-teori Kekerasan*, Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta, 2003.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Ihsan Ali Fauzi dan Zainal Abidin Bagir (ed), *Dari Kosmologi Ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan dan Menentang Fanatisme*, Penerbit Mizan, Bandung, 2011.

Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos (ed), *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta*, Penerbit Setara Institute, Jakarta, 2012.

Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasional*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2003.

Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi*, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta, 2005.

Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia*, Penerbit Freedom Institute, Jakarta, 2011.

M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007.

Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta, 2003.

Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan : Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*, Penerbit Impulse dan Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Penerbit Kopi dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

-----, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.

Suparman Marzuki, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Penerbit Logung Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Tri Guntur Narwaya, *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*, Penerbit Resistbook, Yogyakarta, 2010.



MODUL II

MEMAHAMI KONFLIK BERNUANS KEAGAMAAN

Penulis: Irfan Abu Bakar dan Puguh Windrawan

Setiap konflik yang terjadi dipastikan tidak berdiri sendiri. Tidak tunggal, tetapi melibatkan aktor dan kepentingan lain. Hal yang sama juga terjadi dalam memahami konflik atas nama agama. Persoalan doktrin dan persepsi terhadap sebuah keyakinan seringkali menjadi dasar terjadinya konflik atas nama agama. Hal ini ditambah dengan persoalan munculnya kepentingan ekonomi dan politik. Dalam konteks Indonesia, perlu dipahami bahwa masyarakat negeri ini terkenal religius, dimana peran agama begitu mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kemajemukan juga menjadi ciri khas masyarakatnya.

Di luar kemajemukan yang ada, di Indonesia juga terdapat agama mayoritas. Dalam sistem demokrasi yang baik, justru agama minoritas yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan mayoritas terhadap minoritas. Untuk itu, peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi agama minoritas menjadi hal yang penting. Agama adalah masalah keyakinan yang sifatnya sangat individual. Ada pengalaman rohaniah yang akan membentuk seseorang untuk meyakini apa yang di rasakan benar, dan apa yang dirasakan salah.

MATERI I

PENGERTIAN UMUM DAN TIPE-TIPE KONFLIK

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta dapat memahami pengertian konflik secara umum dan membedakannya dengan konflik kekerasan.2. Peserta dapat memahami tipe-tipe perwujudan konflik.3. Peserta dapat memahami pentingnya mengatasi konflik dengan cara-cara damai.
WAKTU	60 Menit
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Flip Chart2. Spidol3. Poster4. Lembar Kasus
METODE	<ol style="list-style-type: none">1. Poster Session2. Brainstorming3. Diskusi Kelompok (Disko) Kecil4. Diskusi Kelompok (Disko) Besar

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Fasilitator menjelaskan dengan singkat tujuan sesi ini sebagaimana tertera di atas.
2. Lalu menuliskan di atas flip chart empat *Heading*: 'Pengertian konflik'; 'Beda Konflik Biasa dan Konflik Kekerasan'; 'Tipe-Tipe Perwujudan Konflik'; dan 'Penanganan Konflik'.
3. Fasilitator menampilkan beberapa poster (bisa juga karikatur) yang menampilkan sekelumit cerita tentang konflik sehari-hari. Bisa diambil dari konflik yang lagi hangat di media massa. Misal, konflik antara Eyang Subur (ES) dan Adi Bing Slamet, dkk. Atau sebagai ganti, bisa saja Fasilitator membacakan berita tentang sengketa tersebut.
4. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat. Mereka bisa dipancing untuk mengemukakan posisi dan persepsi masing-masing kelompok terhadap kelompok lainnya. Bagaimana Adi Bing Slamet dkk menilai sosok, keyakinan, dan perilaku Eyang Subur, begitu

juga sebaliknya. Mereka juga diminta untuk menggambarkan posisi kelompok ulama (MUI), pengacara, paranormal lainnya, para artis, media, pemirsa TV, dan lain sebagainya terhadap dua kelompok yang bersengketa, dan bagaimana persepsi kelompok terhadap kelompok lainnya.

5. Fasilitator membahas pertanyaan kunci: apakah ada Kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok itu yang melnasi pandangan masing-masing?
6. Selanjutnya Fasilitator meminta peserta untuk menggambarkan hubungan yang berlawanan antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingannya. Lalu dibawahnya ditulis konflik adalah 'hubungan natara dua orang/ kelompok dan lebih, yang memiliki kepantingan yang tidak sejalan."
7. Fasilitator meminta mendiskusikan bagaimana sebaiknya menyikapi perbedaan pandangan tersebut dan selanjutnya menegaskan bahwa perbedaan itu hal yang wajar. Tidak harus diseragamkan, tapi harus ada usaha untuk memperoleh titik temu.
8. Selanjutnya *brainstorming* diarahkan untuk membahas apakah kasus konflik di atas dapat dikategorikan sebagai konflik kekerasan (*violent conflict*). Bila tidak, kapan konflik dapat dikatakan mengandung kekerasan?
9. Fasilitator kemudian membagi peserta ke dalam empat kelompok untuk mendiskusikan tipe-tipe perwujudan konflik dalam masyarakat. Kepada peserta dibagikan lembar kasus dan beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan mengenai empat tipologi konflik.
10. Setelah selesai, fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di kelompok besar. Fasilitator menuliskan di *flip chart* empat tipe konflik (nihil konflik, konflik laten, konflik permukaan, konflik terbuka) dan menuliskan sikap setiap kelompok ketika menghadapi konflik tersebut.
11. Fasilitator membagi dua kelompok. Kelompok I diminta untuk mengambil langkah-langkah tercepat untuk menyelesaikan konflik dan menghadirkan damai sementara di masyarakat. Sedangkan kelompok II mendiskusikan langkah-langkah bertahap dan yang melibatkan banyak kelompok, serta memakan waktu dan menuntut kesabaran untuk menciptakan damai jangka panjang.
12. Sebelum menutup sesi, fasilitator membahas dengan singkat untung rugi dari kedua pendekatan tersebut dan menegaskan mana pendekatan yang ideal. Lalu meminta salah satu peserta merangkum

point-point utama sesi ini sebelum menutupnya dengan sama-sama merayakan keberhasilan melewati sesi ini dengan baik.

Pertanyaan untuk Diksi Kelompok:

1. Berdasarkan definisi konflik, apakah terjadi konflik dalam kasus yang anda hadapi?
2. Bila ada, apakah konflik itu secara lahiriah tampak atau tersembunyi atau laten?
3. Bila konflik itu tampak, apakah sebab-sebabnya itu kuat atau sekadar karena kesalahpahaman belaka?
4. Bagaimana anda menghadapi situasi konflik seperti yang ada dalam kasus anda?

MATERI II

KONFLIK BERNUANSA KEAGAMAAN

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta dapat memahami perbedaan antara agama sebagai doktrin yang mengajarkan damai dan sentimen agama dalam bentuk komunalisme.2. Peserta dapat memahami prasangka, stereotip, dan diskriminasi dalam hubungan antar agama.3. Peserta dapat memahami faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mendasari konflik bernuansa keagamaan.
WAKTU	60 Menit
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Flip Flip Chart2. Spidol dan Potongan Karton3. Lembar kasus
METODE	<ol style="list-style-type: none">1. Brainstorming2. Studi Kasus, dan3. Diskusi Kelompok

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini sebagaimana rumusan di atas. Lalu dia mengajak peserta membahas mengenai ajaran agama yang memerintahkan manusia untuk hidup rukun, damai, dan saling menolong. Secara hati-hati fasilitator menegaskan bahwa inti ajaran agama adalah hubungan timbal-balik, empati, rendah hati, syukur dan berbuat baik.
2. Fasilitator meminta peserta menunjukkan pemahaman orang tentang doktrin agama yang mengajak kepada permusuhan. Fasilitator menekankan bahwa hal itu bukanlah inti ajaran agama, melainkan penafsiran manusia atau elit agama. Fasilitator menegaskan bahwa ajaran agama murni berbeda dengan penafsiran manusia dan bahwa penafsiran manusia harus tunduk kepada ajaran itu sendiri.

3. Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok untuk membahas mengapa rasa benci antara kelompok agama itu besi tumbuh? Fasilitator meminta mereka mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mendorong kepada kebencian itu satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Misalnya, agenda misionarisme, pendirian rumah ibadah, kekerasan atas nama agama, dsb. Fasilitator meminta mereka membahas apa alasan kebencian itu, apakah itu doktrinal atau di luar doktrin agama.
4. Setelah diskusi kelompok Fasilitator menjelaskan bahwa prasangka, stereotip, dan diskriminasi dalam hubungan antar agama muncul bukan sebagai sesuatu yang asli agama melainkan penafsiran yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sosial historis.
5. Fasilitator membahas sebuah kasus dimana suatu peristiwa kriminal biasa yang melibatkan dua preman berbeda agama dapat berubah menjadi konflik yang membawa simbol-simbol keagamaan dan melibatkan umat beragama.
6. Fasilitator meminta peserta mendiskusikan apakah konflik itu konflik agama atau konflik antara preman yang dibungkus agama. Lalu dari mana munculnya sentimen agama itu? Sekali lagi fasilitator menjelaskan bahwa prasangka negatif yang tumbuh subur selama ini bila tidak dihapus bisa menimbulkan potensi konflik yang dapat merusak integrasi dalam masyarakat.
7. Sebelum menutup sesi ini, fasilitator mengajak peserta untuk mengenali faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik apa yang dapat menjadi basis atau akar penyebab pecahnya konflik bernuansa keagamaan yang bersifat massif dan merusak? Pembahasan diarahkan pada hubungan antara komunalisme dengan berbagai faktor non-agama tersebut.
8. Terakhir fasilitator meminta beberapa orang untuk merangkum poin-poin penting yang diperoleh dalam sesi ini.

MATERI III

ANALISIS KONFLIK BERNUANSA KEAGAMAAN

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta dapat memahami arti dan kegunaan analisis konflik2. Peserta dapat menggunakan model Pemetaan Konflik, Model Penuturan Konflik (Story Telling) dan Model Segitiga ABC (<i>Attitude, Behaviour , dan Context</i>) dalam analisis Konflik3. Peserta dapat menentukan langkah-langkah dalam menghadapi konflik.
WAKTU	120 Menit
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Flip Flip Chart2. Spidol, dan Potongan Karton3. Lembar kasus
METODE	<ol style="list-style-type: none">1. Brainstorming2. Studi Kasus dengan mencari jejak, dan3. Diskusi Kelompok dan Menunggu Warung

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini sebagaimana rumusan di atas. Lalu dia membagi peserta ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diberikan kasus konflik yang bernuansa keagamaan. Kasus bisa diadaptasi dari konflik yang terjadi baik yang bersifat massif dan lama (Ambon dan Poso) maupun yang sporadis (seperti kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik ataupun kasus Ciketing). Kasus dipilih yang sesuai untuk penggunaan model analisis yang akan disampaikan.
2. Selain lembar kasus, kepada peserta juga diberikan bahan bacaan mengenai cara-cara atau langkah-langkah praktis menggunakan alat-alat analisis konflik yang tersedia.
3. Fasilitator meminta kelompok pertama mendiskusikan analisis konflik dengan model pemetaan konflik. Proses ini agar lebih menarik bisa dilakukan dengan mengajak kelompok untuk bermain 'mencari jejak'.
4. Kelompok kedua menerapkan analisis story telling, dan Kelompok ketiga menarapkan analisis Segitiga ABC (*Attitude, Behaviour dan Context*)
5. Kepada masing-masing kelompok diberikan beberapa pertanyaan yang membantu mereka menganalisis konflik dengan alat yang tersedia.
6. Setelah diskusi selesai masing-masing kelompok diminta untuk mengunjungi kelompok lain dan menyampaikan hasil analisis menurut kelompok masing-masing. Kelompok yang mendengarkan mencatat dengan seksama, demikian sebaliknya.
7. Proses ini berlangsung terus sehingga semua kelompok dapat memahami ketiga alat analisis dengan baik (Metode Jaga Warung).
8. Setelah kegiatan 'Jaga Warung' dilakukan, fasilitator meminta peserta untuk merefleksikan pengalamannya melakukan analisis konflik. Apa saja tantangan yg mereka hadapi ketika melakukan simulasi analisis konflik. Fasilitator memberikan beberapa catatan penting dan menutup sesi ini dengan mengajak peserta bertepuk tangan merayakan keberhasilan mereka melewati sesi ini dengan baik.

BAHAN BACAAN I

DEFINISI KONFLIK

Ketika kepentingan antara individu atau antara kelompok bertentangan satu sama lain, maka konflik akan terjadi. Karena itu, konflik biasanya diartikan sebagai *'hubungan antara dua pihak atau lebih, pada tataran individu maupun kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki Keentingan-kepentingan yang tidak sejalan'*. Ada yang menganggap bahwa pertentangan kepentingan ini tidak akan bisa diatasi kecuali dengan menyeragamkan kepentingan dalam masyarakat. Tapi sebagian yang lain justru melihat bahwa perbedaan kepentingan sebagai hal yang wajar dan malahan sehat.

Justru hal itu dapat menjadi suatu energi yang menuntun kepada pemahaman yang lebih luas dan kaya terhadap suatu permasalahan, dan bagaimana mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama. Menyeragamkannya justru bisa berbahaya untuk jangka panjang. Konflik kekerasan adalah jawaban ketika saluran dialog dibungkam, suara-suara ketidakpuasan dan kekecewaan tidak digubris, atau tidak ada penegakan hukum terhadap setiap kezaliman. Orang biasanya menyamakan antara konflik dengan kekerasan.

Kalau mendengar ada kejadian konflik, maka yang terbayang adalah kekerasan, luka, peperangan dan baku bunuh. Karena itu orang cenderung menjauhi dan antipati terhadap konflik. Kekerasan meliputi pelbagai tindakan, perkataan, sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Karena itu, konflik tidak lalu berarti kekerasan meskipun tidak sedikit konflik yang disertai atau berujung pada kekerasan.

Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Pelbagai perbedaan pendapat dan konflik yang diselesaikan tanpa kekerasan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar, kalau tidak bagi semua pihak yang terlibat. Karenanya, konflik tidak selalu bersifat negatif, apalagi itu memang bagian dari kehidupan alamiah kita. Hubungan-hubungan manusia dari tingkat paling kecil, antara pribadi, keluarga, hingga ke tingkat komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara tidak bersifat statis, sebaliknya pasti mengalami pertumbuhan dan perubahan dan karenanya mengandung konflik.

Ketidakeimbangan dari hubungan-hubungan itulah yang meratakan jalan bagi munculnya konflik, seperti kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran serta akses pada sumber-sumber alam, serta kekuasaan yang tidak seimbang. Ketidakadilan atau kesenjangan itulah yang biasanya melahirkan pelbagai masalah sosial, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat itu saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan baik yang positif maupun yang negatif, konstruktif maupun yang destruktif. Suatu kejadian penyiksaan yang dilakukan seorang majikan terhadap pembantunya di sebuah keluarga di sebuah daerah di Jawa Tengah, misalnya, dapat menimbulkan dampak yang luas yang melibatkan kekerasan massa, seperti pembakaran toko, penjarahan, dan sebagainya. Sebaliknya, suatu keputusan yang dibuat oleh badan WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa saja menimbulkan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

Ketika Konflik Berbuah Kekerasan

Ada dua pilihan menghadapi situasi potensi konflik: menyalurkannya secara kreatif atau berusaha menekannya agar tidak muncul di permukaan. Pilihan kedua ini sebenarnya cukup berbahaya. Konflik kekerasan adalah jawaban ketika saluran dialog dibungkam, suara-suara ketidakpuasan dan kekecewaan tidak digubris, atau tidak ada penegakan hukum terhadap setiap kezaliman. Dalam banyak kasus ketika konflik ditekan-tekan justru akan menghasilkan masalah dan malahan tidak jarang berubah menjadi kekerasan.

Kasus konflik di Indonesia terutama selama tahun 1998 dimana terjadi pelbagai macam kekerasan di banyak kota. Kasus konflik di Indonesia terutama selama tahun 1998 dimana terjadi pelbagai macam kekerasan di banyak kota-kota besar: pembunuhan, penjarahan, pembakaran, perkosaan, dan intimidasi, adalah contoh nyata bagaimana potensi konflik dibiarkan begitu saja tanpa dikelola secara kreatif.

Berbagai pendapat dan aspirasi yang beragam selama puluhan tahun oleh rezim Orde Baru dibungkam. Jarang terjadi dialog apalagi perdebatan. Berbagai keluhan terhadap kesenjangan ekonomi, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dimana-mana tidak didengar secara serius dan walaupun didengar tidak ada suatu tindakan nyata untuk mengatasinya. Berbagai kasus pelanggaran HAM, ketidakadilan dan kesewenangan-wenangan yang dilakukan baik oleh negara terhadap rakyat, ataupun oleh kelompok dalam masyarakat atas kelompok lainnya tidak pernah diselesaikan secara transparan dan memenuhi rasa keadilan. Pendek kata, tidak ada penegakan hukum dalam masyarakat.

Trauma dan kepedihan yang dialami di masa lampau baik oleh individu lebih-lebih oleh kelompok masyarakat bila tidak diperhatikan dan dikelola secara baik maka akan mungkin melahirkan kekerasan. Terutama trauma yang diakibatkan oleh peperangan atau pembasmian suatu kelompok masyarakat atau etnis tertentu oleh kelompok lainnya. Perasaan terluka atau kepedihan akibat penindasan di masa lalu biasanya akan lama dirasakan oleh yang menderita.

Bila hal itu tidak diakui dan diatasi, maka akan sangat mungkin melahirkan suatu ketakutan bila kepedihan itu muncul kembali. Oleh karenanya sikap dan perilaku masyarakat demikian biasanya tidak stabil dan dengan mudah muncul perasaan dendam kepada pihak-pihak yang dianggap telah menzaliminya. Bila dendam itu dipenuhi dengan kekerasan, maka tak ayal akan melahirkan lagi luka-luka baru yang makin lama makin meluas dan semakin sukar disembuhkan. Bila kekerasan yang dihasilkan oleh trauma masa silam itu diatasi dengan kekerasan pula maka akan muncul dalam masyarakat suatu budaya kekerasan (*the culture of violence*).

Tipologi Perwujudan Konflik

Berdasarkan perbedaan kepentingan dan perilaku atau cara orang-orang meraih kepentingannya, kita dapat membagi situasi konflik dalam empat jenis.

1. Nihil Konflik: yaitu suatu situasi dimana orang-orang atau kelompok yang berbeda meraih kepentingannya dengan cara-cara atau perilaku yang selaras. Situasi nihil konflik dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup dalam situasi nihil konflik atau damai, tidak bisa terus berdiam diri dan pasif seolah-olah tidak akan terjadi konflik. Sebaliknya, yang terbaik menyikapi situasi ini adalah terus secara aktif dan dinamis, memanfaatkan potensi konflik yang ada, dengan cara mengelolanya secara kreatif.
2. Konflik Laten atau tersembunyi: yaitu suatu situasi dimana orang-orang atau kelompok yang berbeda meraih kepentingannya dengan perilaku yang kelihatannya selaras, tetapi mengandung konflik yang tersembunyi. Dengan kata lain konflik berada di bawah karpet tidak mencuat ke permukaan. Situasi seperti ini biasanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang mengalami perbedaan ekonomi, dimana kelompok ekonomi kuat dan kaya tidak menunjukkan kepedulian yang nyata kepada kelompok ekonomi lemah atau miskin. Situasi seperti ini berbahaya jika dibiarkan secara terus menerus apalagi secara sengaja ditekan, karena akan mudah

melahirkan konflik terbuka yang sulit untuk ditangani. Karenanya menyikapi situasi seperti ini adalah justru dengan cara mengangkat konflik itu ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

3. Konflik Terbuka: yaitu situasi dimana orang-orang dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda dan meraih kepentingannya dengan perilaku yang saling bertentangan. Situasi konflik seperti ini memiliki akar yang kuat. Menyikapi situasi konflik seperti ini adalah dengan cara mengatasi akar penyebab konflik itu berikut dengan efek-efeknya.
4. Konflik Permukaan: yaitu situasi dimana orang-orang dengan perbedaan kepentingan meraih kepentingannya dengan cara yang bertentangan. Namun berbeda dengan konflik laten, konflik tipe ini tidak memiliki akar penyebab yang kuat. Biasanya konflik terjadi akibat dari kesalahpahaman yang dimungkinkan oleh disinformasi, dsb. Cara menyikapi konflik seperti ini adalah meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

BAHAN BACAAN II

BAHAYA PRASANGKA, STEREOTIP, DAN DISKRIMINASI

Identitas sebenarnya banyak dipengaruhi oleh hubungan individu dengan orang lain, dan oleh budaya yang dominan. Seorang perempuan, misalnya, harus berhadapan dengan kerangka pandangan umum yang diberikan oleh budayanya mengenai bagaimana seorang harus menjadi perempuan. Pada dasarnya pengelompokan individu berdasarkan kategori-kategori tersebut dapat berguna bagi setiap orang untuk menilai dirinya dan menilai orang lain. Tidak mungkin setiap saat ia melakukan penilaian individu pada setiap orang.

Namun, tidak jarang pengelompokan ini terjebak kepada semacam stereotip yang tidak tepat dan menyesatkan tentang identitas orang tertentu. Hal mana didasarkan pada informasi yang tidak sempurna dan disaring dari latar belakang dan pengalaman hidup seseorang. Stereotip semacam ini akan semakin berkembang bila disebarkan oleh media. Misalnya saja, stereotip orang Cina yang menghalalkan segala cara, stereotip orang Madura yang kasar dan pendendam, orang Jawa yang tidak terus terang, orang Islam yang fanatik dan jumud, orang Barat yang 'bebas' tanpa batas.

Stereotip dekat dengan hal-hal negatif lainnya, yakni prasangka dan diskriminasi. Prasangka dapat diartikan sebagai opini tentang sesuatu, seseorang atau suatu kelompok yang terbentuk terlalu dini, tanpa alasan yang baik atau pengetahuan atau pengalaman yang cukup. Stereotip dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang digeneralisir dan tercipta karena prasangka terhadap sesuatu kelompok tertentu terlalu disederhanakan sehingga seseorang memandang seluruh anggota kelompok itu memiliki sifat pembawaan tertentu yang negatif. Sedangkan diskriminasi adalah perilaku negatif yang disebabkan oleh prasangka dan stereotip terhadap suatu kelompok atau kelompok-kelompok tertentu.

Banyak sekali masalah yang muncul karena orang memperlakukan orang lain berdasarkan stereotip saja. Ras dan gender merupakan kategori yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok secara keseluruhan dan membenarkan perlakuan yang tidak manusiawi atau ketidakadilan. Ras Cina di Indonesia selama kurun waktu Orde Baru sering dijadikan kambing hitam atas kegagalan pemerintah menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Karena itu, acap kali mereka menjadi sasaran amuk

massa, bila terjadi banyak ketidakpuasan di akar rumput yang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan orang Cina. Dan biasanya pemerintah tidak terlalu mengkhawatirkannya.

Identitas Pada Saat Konflik

Salah satu dimensi identitas pada saat terjadinya konflik adalah perwujudannya sebagai cara guna merespon ancaman baik yang nyata maupun yang hanya dirasakan. Identitas dengan berbagai labelnya: agama, etnis, bangsa, dsb. menjadi semacam perlindungan yang dapat memberikan rasa aman ketika ketakutan muncul dan berkembang. Pada saat yang sama para pemimpin menggunakan identitas itu sebagai cara mengeksploitasi rasa takut dan dorongan untuk berkuasa. Tanpa kekuatan dan pertahanan diri, individu dengan mudah masuk dalam perangkap pelabelan identitas yang dipaksakan oleh pihak lain.

Pada umumnya orang sepakat bahwa semua agama mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, sebaliknya agama tidak mengajarkan umatnya untuk saling membantai satu sama lain. Tapi, mengapa acap terjadi konflik kekerasan atas nama agama, mengapa umat atau pemeluk agama demikian bersemangat melukai, membunuh dan membantai pemeluk agama lain? Mengapa mereka terjebak dalam konflik berbau agama? Jarang orang menyadari bahwa disamping agama sebagai ajaran atau doktrin yang mengajarkan kebaikan, damai, kasih sayang, ada unsur lain yang mempengaruhi kehidupan orang sebagai individu ataupun sebagai kelompok masyarakat.

Unsur itu adalah budaya yang menjadi bagian dari identitas orang selain agama. Di sini, agama sebagai ajaran dan agama sebagai budaya adalah dua hal yang berbeda. Ketika agama mengajarkan kepada pemeluknya, baik Islam atau Kristen atau yang lainnya untuk saling mencintai sesama manusia tanpa melihat kepada perbedaan agamanya, dan agama mempromosikan perdamaian dan toleransi serta melarang kekerasan, namun para pemeluk agama yang memiliki budaya kekerasan akan dengan mudah melupakan ajaran agamanya yang anti kekerasan dan memberikan penekanan yang kuat kepada budaya kekerasan.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang secara sosial, politik ataupun ekonomi dalam posisi tertindas atau terancam oleh dominasi kelompok lain, akan dengan mudah menjadikan agamanya sebagai basis ideologi untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok lain yang berbeda agama, yang dianggap mengancam atau menindas mereka.

Di sini, agama menjadi unsur utama dalam budaya dikerahkan sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan dari dominasi pihak lain sehingga mampu

mengontrol diri sendiri, otonomi atau pemerintah sendiri. Hal ini berlaku pada misalnya orang Tibet pemeluk agama Budha di Cina, Kaum Sikh di India, Muslim Bosnia di bekas Yugoslavia, Muslim Palestina di wilayah yang dikuasai Israel.

Sentimen Agama dan Komunalisme

Sentimen agama adalah problem yang biasa dihadapi oleh komunitas beragama, baik antar kelompok agama maupun antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Sentimen ini biasanya bersumber dari klaim keselamatan atau kebenaran yang dikedepankan oleh para pendakwah masing-masing agama yang disampaikan di hadapan para penganut atau jemaat agama tersebut.

Retorika keselamatan ini tidak hanya terjadi antara agama yang berbeda, tetapi tidak jarang kita dapatkan bahwa dalam satu agama terdapat berbagai aliran atau mazhab yang saling merasa paling benar dan menuduh yang lain sebagai sesat atau bahkan mengkafirkannya. Yang sering menimbulkan perasaan tersinggung di antara umat beragama adalah kebiasaan para pendakwah masing-masing agama untuk meyakinkan umatnya terhadap doktrin ketuhanan atau teologis dengan cara membandingkannya dengan teologi agama lain yang digambarkan sebagai lemah atau sesat.

Lalu biasanya muncul perasaan superioritas di kalangan umat beragama atas umat agama lainnya. Reaksi yang muncul dari umat agama yang dihujat bukannya keraguan terhadap doktrin agamanya, malahan biasanya keyakinannya semakin mengental. Lalu, muncul upaya pembelaan diri (defensif) melalui penguatan ke dalam atau menyerang pihak lawan (ofensif). Caranya, mencari kelemahan agama lain yang dianggap dapat dijadikan sebagai suatu perimbangan, atau setidaknya penguatan secara tidak langsung perasaan identitas umat agama tersebut.

Kompetisi teologis antara umat beragama jarang atau tidak pernah berakhir dengan pengakuan umat terhadap kebenaran umat lainnya. Malahan, tidak jarang, hal itu justru mengentalkan keyakinan umat tersebut dan pada saat yang sama semakin menciptakan suasana yang tidak toleran antara keduanya. Demikian halnya yang terjadi di dalam intern agama.

Agama pada umumnya memiliki watak misionaris, yakniewartakan ajaran agama kepada orang lain yang belum memeluk agama tertentu, atau yang telah menjadi bagian dari komunitas agama tertentu. Ajaran yang diwartakan itu pada esensinya adalah klaim keselamatan bagi pemeluknya bila menjalankan agama tersebut. Proses pewartaan agama ini ada yang dilakukan dengan jalan kekerasan atau paksaan ada pula yang dilakukan dengan jalan damai.

Masuknya agama-agama di Indonesia, sejak Hindu, Budha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, hingga Konghuchu, pada umumnya dianggap berlangsung secara relatif damai. Islam misalnya masuk ke Nusantara setelah agama Hindu dan Budha melalui para pedagang Arab dari Gujarat, India. Mereka sembari berdagang menyiarkan agama Islam di Nusantara, sehingga pada abad ke-16 sebelum datangnya Portugis yang diikuti Belanda, sebagian besar Nusantara, khususnya Jawa telah dihuni oleh kaum Muslim.

Kedatangan Portugis di abad ke-16 dan Belanda di abad ke-17, 18, 19, dan 20 untuk mengembangkan kekuasaan dan hegemoninya di nusantara telah diikuti oleh kegiatan misionarisme agama Kristen, sehingga dalam masa-masa tersebut telah terjadi konversi atau perpindahan agama baik dari masyarakat animis, Hindu, Budha, maupun Muslim. Kristen Katolik dan Protestan lambat laun mendapat tempat di nusantara, baik karena dukungan pemerintahan kolonial maupun oleh karena kegigihan para misionaris dalam menyebarkan agama tersebut.

Dari segi komposisi diyakini, bahwa Islam merupakan mayoritas, sedangkan secara berturut-turut Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu merupakan agama-agama yang tergolong minoritas. Namun demikian, di beberapa daerah agama-agama seperti Kristen Katolik dan Protestan merupakan mayoritas penduduk, seperti di NTT, Papua, Manado dan Tapanuli. Sedangkan di Bali Hindu merupakan agama mayoritas. Di beberapa kota telah terjadi semacam pergeseran komposisi penduduk berdasarkan agama. Yang mencolok adalah yang terjadi di Ambon.

Pada masa Portugis, Belanda, pemerintahan Orde Lama, hingga pertengahan Orde Baru, pemeluk Kristen adalah penduduk mayoritas, sedangkan Muslim adalah minoritas. Namun, pergerakan demografis sebagian Muslim dari suku-suku lain ke Ambon, seperti suku Buton, Bugis, dan Makassar, yang umumnya menetap sebagai pedagang telah menyebabkan komposisi tersebut berimbang. Bagi sebagian Kristen di Ambon ini dapat dianggap sebagai ancaman keberadaan mereka.

Perlakuan kolonial yang dinilai diskriminatif, yakni lebih memprioritaskan penduduk Kristen ketimbang Muslim dalam bidang pekerjaan dan pendidikan telah memberikan bekas yang buruk bagi hubungan kedua belah pihak di kemudian hari. Di Ambon dan Manado, misalnya, pihak Belanda merekrut penduduk Kristen sebagai tentara dan pegawai pemerintah. Sedangkan penduduk Muslim lebih banyak yang memilih sebagai pedagang.

Pada sisi lain, bagi sebagian Muslim pertempuran panjang melawan kolonial Belanda dikonotasikan sebagai pertempuran melawan Kristen, dimana kolonialisme diidentikkan dengan Kristenisasi. Meskipun, kenyataan

pewartaan Kristen itu ada dalam sejarah, namun tidak sepenuhnya pihak kolonial memihak kepada Kristen. Program misionarisme yang dijalankan oleh Kristen hingga kini tetap menimbulkan kecurigaan dari kalangan Muslim, terutama mereka yang berprofesi sebagai pendakwah.

Kristenisasi tetap menjadi isu yang sewaktu-waktu menyulut konflik. Apalagi bila proses itu bagi sebagian pihak diyakini dijalankan dengan berbagai cara bujuk rayu, umpan atau paksaan. Di kalangan Muslim tersebar isu bahwa Kristenisasi biasa dijalankan dengan memanfaatkan kemiskinan keluarga Islam, sehingga dengan iming-iming sedikit imbalan harta mereka mau pindah agama. Disamping itu ada juga isu bahwa Kristenisasi melalui perkawinan terselubung, dimana laki-laki Kristen mengawini wanita Muslim, dan mengajaknya menjadi Kristen.

Isu-isu semacam ini telah menyuburkan kecurigaan di kalangan Muslim. Sebaliknya, di beberapa kantong Kristen, timbul juga perasaan yang sama. Kelompok Kristen merasa bahwa para pendatang Muslim telah sengaja melakukan Islamisasi dengan memanfaatkan negara. Pendirian bank-bank Muamalat, pusat-pusat Islam, penempatan orang Islam di posisi-posisi strategis tertentu, di kantong-kantong Kristen telah dicurigai sebagai program Islamisasi. Kini, stereotip Islam sebagai pendukung terorisme mungkin saja telah mulai berkembang di benak dan kesadaran non-Muslim.

Hal ini bila terjadi akan semakin problematis bagi hubungan antar pemeluk agama. Sentimen keagamaan yang berakar dari eksklusivisme klaim kebenaran agama serta dipupuk oleh sejarah panjang misionarisme menemukan tempatnya pada perasaan solidaritas yang berdasarkan agama (komunalisme). Dalam solidaritas komunal, individualisme tidak mendapat tempat. Orang-orang cenderung diarahkan untuk membela sesama agamanya tanpa menghiraukan apakah yang dibela itu layak dibela karena misalnya mengalami penindasan oleh orang lain.

Jika salah satu dari anggota komunal itu dianiaya oleh seorang kriminal dari agama yang berbeda, maka peristiwa yang sesungguhnya murni kriminal itu bila tidak segera diselesaikan secara hukum, maka akan dengan mudah memancing sentimen keagamaan. Tidak sedikit konflik berbau agama di Indonesia dipicu oleh kejadian yang awalnya murni kriminal. Prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang hidup dalam lingkungan komunal akan dengan mudah mendapatkan katarsis manakala terjadi peristiwa kriminal yang melibatkan oknum yang berbeda agama.

Pada dasarnya, dan banyak orang meyakini, bahwa hampir semua agama tidak menganjurkan konflik. Semua agama mengajarkan cinta dan perdamaian. Namun, agama-agama juga menganggap penting ditegakkannya keadilan. Biasanya bukanlah doktrin dasar dan resmi dari

agama-agama yang menciptakan rasa kebencian, tetapi lebih rasa kebencian banyak berawal dari mitos dan simbol yang dihubungkan dengan imajinasi yang sangat diskriminatif.

Faktor-Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik yang mendasari Konflik Bermanusiaan Keagamaan

1. Polarisasi Sosial

- Konflik bermasyarakat agama akan mudah pecah dalam suatu situasi kehidupan sosial yang mengalami polarisasi atau pengkutuban. Polarisasi ini memudahkan berkembangnya sikap saling tidak percaya dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2. Kesenjangan Sikap Terhadap Situasi Konflik

Konflik bermasyarakat keagamaan bisa diperparah juga oleh adanya perbedaan pandangan yang tajam mengenai situasi konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Para pihak berpegang dengan pandangan subjektifnya terhadap perbedaan kepentingan yang terjadi dan cenderung mencampuradukkan antara emosi pribadi dan masalah yang sebenarnya. Mereka juga tidak mampu menegosiasikan kepentingan-kepentingan mereka dan mencapai kesepakatan.

BAHAN BACAAN III

APA DAN MENGAPA MENGANALISIS KONFLIK?

Analisis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Disebut proses karena analisis konflik bukan merupakan kegiatan yang sekali jadi. Tetapi, ia merupakan proses yang berlangsung terus seiring dengan perkembangan situasi, sehingga tindakan dalam mengatasi konflik dapat disesuaikan dengan berbagai faktor, dinamika dan keadaan yang berubah.

Dalam banyak pengalaman orang-orang yang mengalami konflik, penyelesaian konflik tidak mudah dicapai sebelum mereka memahami betul apa yang sedang terjadi berkaitan dengan konflik yang dihadapi. Bagaimana dinamika, hubungan-hubungan yang terjadi serta apa isu-isu penting yang muncul dalam konflik. Dalam kenyataannya, pemahaman tersebut dapat mereka peroleh dengan cara melakukan analisis konflik secara rinci serta dengan menggali isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik-konflik itu.

Pendek kata analisis konflik akan sangat berguna dalam:

- a. Memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian konflik yang terjadi.
- b. Mengidentifikasi semua aktor atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan bukan hanya kelompok yang menonjol saja.
- c. Memahami pandangan semua aktor atau kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik .
- e. Menentukan langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghadapi konflik.

Model-Model Analisis Konflik

Metode-metode dan alat-alat yang berbeda dapat digunakan dalam kaitannya dengan dinamika konflik khusus yang dianalisis. Namun, metode-metode ini dapat berubah bergantung pada konteks, waktu, dan berbagai aspek lainnya, yang harus dipertimbangkan oleh para praktisi yang melakukan analisis konflik.

Dalam pendekatan 'Resolusi Konflik' terdapat banyak alat-alat analisis yang digunakan secara luas dan diterima oleh para profesional dan praktisi

di seluruh dunia. Model Pemetaan Konflik, model Penuturan Cerita (*Story Telling*), model Ketakutan dan Kebutuhan, model Segitiga ABC (*A=attitude; B=behaviour; C=context*), model Matahari (*Sun*), adalah alat-alat yang dapat membantu kita untuk menganalisis hubungan-hubungan, sebab-sebab dan juga akibat-akibat dari sebuah konflik.

Model Grid dapat membantu kita menganalisis situasi yang sedang kita hadapi dan situasi yang ingin kita ciptakan melalui analisis sumber-sumber yang kita miliki baik itu aktor maupun faktor yang dapat mendukung terciptanya perdamaian atau rekonsiliasi. Penting untuk diperhatikan bahwa akan sangat membantu bila menggunakan lebih dari satu alat atau model analisis untuk situasi konflik yang sama. Dengan demikian lebih banyak informasi dan beragam perspektif yang dapat diperoleh, sehingga dapat membantu sebuah organisasi untuk merencanakan sebuah tanggapan yang paling tepat.

a. Pemetaan Konflik

Alat bantu ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Pemetaan konflik berguna untuk mengetahui berbagai sudut pandang masyarakat yang berbeda ketika memetakan situasi mereka bersama. Mereka juga dapat saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

Langkah-langkah:

- Tentukan apa yang ingin dipetakan, kapan dan dari sudut pandang apa. Adalah sangat rumit memetakan suatu konflik dari semua sudut pandang. Dan lebih bermanfaat bila setiap kelompok melakukan pemetaan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, dan inti dari analisis ini adalah mencoba merenkonsiliasi sudut pandang yang berbeda dalam rangka mengelola konflik.
- Jangan lupa menempatkan diri kita atau organisasi kita di peta. Menempatkan diri kita dalam peta menunjukkan bahwa kita ada dalam situasi konflik tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik langsung maupun tidak langsung memiliki persepsi tertentu tentang organisasi yang ingin menengahi konflik. Sebagai pihak penengah kita sedapat mungkin memiliki hubungan atau kontak dengan pihak-pihak yang menghendaki diselesaikannya konflik tersebut.
- Dalam melakukan pemetaan penting mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut sebagai berikut:
 1. Siapa pihak-pihak utama yang terlibat?

2. Siapa pihak-pihak lain yang berkaitan dengan konflik? Termasuk kelompok kecil atau pihak luar?
3. Apa hubungan antara semua pihak itu? Bagaimana caranya pihak-pihak itu terwakili dalam peta? Siapa saja yang melakukan persekutuan (aliansi)? Siapa saja yang memiliki hubungan dekat? Siapa saja yang mengalami hubungan yang retak? Siapa saja yang mengalami konfrontasi?
4. Apa saja isu-isu pokok di antara pihak-pihak yang ada dalam peta, setidaknya pihak-pihak yang berkonfrontasi? Bagaimana hubungan kita sebagai kelompok penengah dengan pihak-pihak yang ada dalam peta. Apakah ada hubungan khusus?

b. Penuturan Cerita (*Story Telling*)

Model analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai versi penilaian yang diberikan oleh masing-masing pihak atau kelompok yang berkonflik mengenai cerita yang 'sama'.

Langkah-langkah:

- Datangilah masing-masing kelompok yang bertikai dan dengarkanlah cerita mereka tentang konflik tersebut.
- Buatlah daftar poin-poin utama yang sesuai dengan konflik tersebut, khususnya yang dianggap penting atau bernilai bagi masing-masing kelompok.
- Buatlah sekali lagi daftar yang saling berlawanan. Dalam hal ini, letakkanlah informasi yang sesuai secara bersamaan (dalam satu baris yang sama), dan buatlah dalam pola yang seragam.
- Bila perlu, buatlah 'garis waktu' (*timeline*). Misalnya, apa yang dikatakan oleh satu kelompok tentang kejadian pada tahun tertentu, bagaimana kelompok lain menggambarkan kejadian yang berlangsung pada tahun yang sama, serta peristiwa penting apa yang terjadi menurut masing-masing kelompok.
- Carilah perbedaan-perbedaan atau informasi yang kurang dan usahakan untuk mengumpulkan informasi yang dimaksud.
- Pengumpulan informasi sebenarnya dapat dilakukan secara terpisah. Namun, kalau kelompok-kelompok menghendaki adakanlah sebuah pertemuan yang lebih besar lagi dimana setiap kelompok dapat membagi cerita menurut versinya masing-masing.

Catatan Penting :

1. Bila kedua kelompok merasa dapat duduk bersama secara tenang dan saling percaya, maka yang terbaik adalah mengajak mereka duduk bersama untuk membahas masalah tersebut.

2. Ini adalah penuturan cerita, bukan 'fact finding'. Karena itu penting menunjukkan minat untuk mendengarkan cerita tersebut.
3. Cara lain kalau memungkinkan adalah meminta satu kelompok untuk mengganti peran, yakni menuliskan bagaimana kelompok di seberang akan mempersepsi situasi. Dalam kasus di atas bagaimana misalnya militer mencoba menggambarkan situasi kalau mereka menjadi penduduk sipil, atau sebaliknya.
4. Dalam menjalankan proses ini, kita tidak boleh hanya terpaku pada data dan mengabaikan emosi orang-orang yang menuturkan ceritanya. Karena itu, penting sekali untuk ikut memahami emosi masing-masing kelompok dalam kaitannya dengan konflik.
5. Namun, dalam usaha memahami emosi ini, hendaknya pendengar tidak terkecoh dengan usaha melebih-lebihkan cerita sehingga menganggapnya sebagai fakta. Harus hati-hati!
6. Alat analisis ini harus disesuaikan dengan konteks komunitas yang dihadapi. Kalau tidak cocok dengan metode menuliskan cerita, sebaiknya digunakan penuturan lisan saja.
7. Setelah analisis diselesaikan, maka tindakan selanjutnya adalah mem-follow up analisis dengan membagi informasi ke berbagai pihak terkait: penduduk, pihak militer, aparat pemerintah terkait, NGO, pemuka agama, pemimpin politik, organisasi berbasis komunitas, perkumpulan dagang, dan media.
8. Hasil analisis dapat digunakan untuk bahan kelompok mediator dan fasilitator konflik; untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan jaringan; untuk menciptakan kesadaran untuk dipublikasikan.

c. Model Segitiga ABC

Alat analisis ini berguna untuk membantu fasilitator untuk memahami pola perilaku (*Behaviour* atau B) masyarakat pada saat terjadinya konflik serta faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tersebut. Faktor-faktor tersebut disebut *Attitude* (A) dan *Context* (C). Alat ini disebut Segitiga ABC karena membahas *Attitude* (sikap dan cara pandang), *Behaviour* (perilaku), dan *Context* (konteks atau kejadian-kejadian yang melingkupi konflik). Model ini didasari oleh asumsi bahwa perilaku orang dapat berubah cepat, namun tidak dengan sikap dan konteks yang mereka hadapi. Demikian pula sikap dan konteks mempengaruhi perilaku mereka. Namun yang jelas ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Langkah-langkah:

- Analisis ini dapat dilakukan dalam kelompok kecil.
- Mintalah kepada para peserta untuk membahas situasi dari perspektif mereka.
- Mintalah mereka untuk membuat daftar ABC menurut pemahaman mereka.
- Mintalah mereka untuk saling memahami situasi masing-masing dengan cara kelompok yang satu 'bertukar peran' ke kelompok yang lain, begitu pula sebaliknya.
- Arahkanlah pembahasan sedemikian rupa hingga mereka saling mengerti satu sama lain!

Catatan Penting:

1. Memang mudah mengubah pola perilaku, tapi mengubah sikap dan konteks jauh lebih penting.
2. Harus diingat bahwa penggunaan alat analisis ini, sebagaimana alat analisis sebelumnya, tanpa melibatkan kelompok yang berkonflik dapat mengarah pada kesalahpahaman.
3. Sebelum menerapkan suatu kegiatan follow-up perhatikanlah analisis ABC dan putuskan aspek mana yang hendak didahulukan. Setelah kegiatan tersebut rampung maka alat analisis yang sama dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan untuk melihat sejauh mana perubahan yang direncanakan dapat tercapai.
4. *Follow up* kegiatan analisis ini sama dengan yang disampaikan pada poin-poin *follow up* pada kedua model analisis sebelumnya. Intinya adalah sosialisasi hasil analisis kepada pihak-pihak terkait dan pemanfaatan hasil analisis oleh tim mediator atau fasilitator.

TOLERANCE

"Peace is not the absence of war. It is the presence of justice and the absence of fear."



MODUL III

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TAHAPAN-TAHAPAN KONFLIK BERNUNSA
KEAGAMAN BERDASARKAN FUNGSI

Penulis: Masmoeiyadi Wijaya

Polisi memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Peran tersebut tidak hanya berlangsung dalam fase krisis dimana kekerasan terjadi. Namun sejak dini upaya mengendus potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan yang memiliki basis persoalan agama menjadi sangat penting. Dalam beberapa kasus terakhir seperti yang terjadi pada penyerangan jama'ah Ahmadiyah di Cikesik dan Syiah di Sampang menunjukkan seringkali menunjukkan rendahnya antisipasi dan deteksi dini terhadap persoalan keamanan.

Bagian ini berisi tiga tahapan penting respon Kepolisian di dalam konteks penanganan kekerasan berbasis isu keagamaan, yaitu: (1) sebelum kejadian, (2) kejadian/insiden kekerasan, dan (3) pasca insiden.

MATERI I

SEBELUM TERJADINYA INSIDEN

TUJUAN MATERI	<p>Setelah materi ini, peserta diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami arti penting kemitraan dengan masyarakat dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat. 2. Mampu melaksanakan fungsi-fungsi teknis kepolisian yang berkaitan dengan aspek preventif (sebelum terjadi krisis) kekerasan bernuansa keagamaan.
WAKTU	90 menit
TEMPAT	Ruang Pembelajaran Akpol

BAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Bacaan 2. LCD/ Proyektor 3. Kertas Plano 4. Spidol 5. Ballpoint 6. Potongan kertas HVS
-------	--

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Curah Pendapat:

- a. Fasilitator sedikit mereview materi di modul 2 sehingga peserta bisa memahami koherensi antara modul 2 dan 3.
- b. Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini.
- c. Fasilitator membagikan potongan-potongan kertas kepada peserta.
- d. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menulis pada potongan kertas yang telah dibagikan tentang apa yang dipahami/dimengerti sebagai kemitraan dengan masyarakat dan arti pentingnya dalam menangani konflik-konflik bernuansa keagamaan.
- e. Jika sudah selesai, fasilitator bisa mengomentari secara acak jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta.

2. Diskusi Kelompok

- a. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok fungsi teknis. Setiap kelompok terdiri atas empat atau lima orang peserta (sesuai dengan peserta).
- b. Tugas kelompok adalah mendiskusikan aktivitas preventif sebelum meningkatnya eskalasi menjadi kekerasan:
 - Aktivitas yang Harus dilakukan untuk identifikasi dan deteksi dini kekerasan.
 - Keterampilan yang Dibutuhkan, dan
 - Dasar Hukum (UU, Peraturan, Perkap, SOP, dll)
- c. Hasil diskusi di catat dalam matriks sebagai berikut:

No.	Fungsi Teknis	Aktivitas	Ketrampilan yang diperlukan	Dasar Hukum

- d. Mintalah perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dalam pleno. Perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk membacakan dan mengklasifikasikan berdasarkan gagasan utamanya. Lakukan klarifikasi terhadap pendapat peserta dan buatlah catatan kesimpulan.
- e. Diakhir kegiatan, fasilitator atau Gadik fungsi teknis dapat memberikan penjelasan tambahan melalui presentasi dengan media yang tersedia.

MATERI II

SAAT TERJADINYA INSIDEN

TUJUAN MATERI	Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan: <ol style="list-style-type: none">1. Memahami tindakan-tindakan kepolisian yang harus dilakukan ketika terjadi insiden kekerasan yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Penghentian kekerasan.b. Pemisahan kelompok-kelompok yang bertikai, danc. Penegakan hukum.2. Memahami tupoksi masing-masing fungsi teknis dalam suatu insiden kekerasan bernuansa keagamaan.3. Memahami bagaimana pelibatan personil dalam suatu tindakan kepolisian (khususnya ketika terjadi insiden kekerasan).
WAKTU	45 menit
TEMPAT	Ruang Pembelajaran Akpol
BAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kertas Plano2. Spidol3. LCD4. Slide Presentasi5. Film pendek: “Insiden Manis Lor”

ALUR PEMBELAJARAN

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini.
2. Fasilitator membagi peserta kedalam empat atau lima kelompok (bisa disesuaikan dengan peserta).
3. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa sesi ini peserta akan diajak menonton film. Film yang ditampilkan adalah film pendek bagaimana seorang Kapolres di wilayah hukum Polres Cirebon menangani tindakan-tindakan penyerangan terhadap kelompok keagamaan.

4. Setelah film ditonton mintalah peserta mendiskusikan point-point sebagai berikut:
 - a. Pelajaran apa yang anda peroleh dari film tersebut?
 - b. Tindakan kepolisian apa yang dilakukan ?
 - c. Bagaimana pelibatan personel, khususnya di fungsi teknis?
5. Jika diskusi dianggap cukup, fasilitator atau gadik pendamping bisa memberikan catatan-catatan atas proses yang terjadi. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan substansi pembahasan
6. Tutuplah diskusi dengan mengajak peserta untuk bertepuk tangan sebagai rasa gembira mereka dalam belajar.

MATERI III

PASCA INSIDEN

TUJUAN MATERI	Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan: 1. Memahami tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan pasca insiden kekerasan 2. Memahami dan melakukan fungsi teknis terkait dalam melakukan evakuasi dan aktivitas pasca insiden kekerasan.
WAKTU	45 menit
TEMPAT	Ruang Pembelajaran Akpol
BAHAN	1. Kertas Plano 2. Spidol 3. LCD 4. Slide Presentasi 5. Bahan Bacaan

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini.
2. Ajaklah peserta untuk membentuk kelompok. Fasilitator bisa menyesuaikan jumlah kelompok sesuai dengan jumlah peserta.
3. Fasilitator melontarkan pertanyaan untuk memancing diskusi awal dari sesi ini.
 - a. Tindakan apa yang dilakukan pasca insiden kekerasan?
 - b. Bagaimana melakukannya ?
 - c. Fungsi-fungsi teknis apa saja yang dimobilisasi untuk melakukan tindakan kepolisian pasca insiden kekerasan bernuansa keagamaan?
4. Mintalah masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi mereka pada kertas plano, lalu menempelkannya pada tempat yang telah disediakan.
5. Setelah semua kelompok menempelkan hasilnya, ajaklah masing-masing kelompok untuk berkeliling membaca hasil diskusi kelompok lain dan mintalah mereka membuat catatan-catatan penting.
6. Jika dianggap selesai tutuplah diskusi ini.

BAHAN BACAAN I

INTERVENSI POLISI DALAM TAHAPAN-TAHAPAN KEKERASAN DAN KONFLIK

Tahap I : Pra Konflik

No	Satuan Fungsi	Ativitas yang dilakukan	Ketrampilan yang dibutuhkan	Dasar Hukum
1.	Bimmas	<ul style="list-style-type: none">- Sambung desa- Penyuluhan hukum,- DII	<ul style="list-style-type: none">- Imparsial.- Komunikasi.- Memiliki integritas dan etika yang baik.- Kreatif dan fleksibel.- Terampil mendengar permasalahan yang dipertentankan.- Mementingkan respon dari pada reaksi.- Empati.	<ul style="list-style-type: none">- UU Polri- UU HAM- Perkap No. 07 tahun 2008 tentang Polmas
2.	Intelkam	<ul style="list-style-type: none">- Penyelidikan (tertutup)- Observasi- Analisa konflik	<ul style="list-style-type: none">- Dapat berinteraksi secara santun bersama warga masyarakat setempat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan agama serta adat dan istiadat setempat- Netral dan objektif- Komunikatif	<ul style="list-style-type: none">- UU Polri- UU No. 7 Tahun 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial- Perkap No. 3 tahun 2009
3.	Humas	<ul style="list-style-type: none">- Siaran pers- Kontra informasi	<ul style="list-style-type: none">- Kemampuan komunikasi.- Jejaring dengan media.	Perkap No. 16 Tahun 2010

Tahap II: Kejadian/Insiden Kekerasan

No.	Satuan Fungsi	Ativitas yang dilakukan	Ketrampilan yang dibutuhkan	Dasar Hukum
1.	Sabhara	<ul style="list-style-type: none"> - Penjagaan - Patroli - Memisahkan pertikaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku yang baik (sopan) - Netral - Dapat menilai dan menempatkan Kamtibmas sebagai fokus utama - Menguasai permasalahan dan budaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Polri - UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. - UU No. 7 Thn 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. - Skep Pol No: Skep/244/IV/2004 tgl 21 April 2004 ttg himpunan petunjuk kegiatan fungsi Samapta - Perkap No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. - Perkap tahun 2006 tentang pedoman Dalmas. - PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

2.	Reskrim	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan langsung di TKP untuk memantau provokator dan tokoh-tokoh utama. - Menandai dan mengikuti actor-aktor yang melakukan tindak pidana, kekerasan dan anarki. - Meliput orang-orang yang melakukan anarki dan kekerasan. - Mengumpulkan barang bukti di TKP. - Menyiapkan tim penyidik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap perundangan yang berlaku. - Pemahaman terhadap perundangan yang sifatnya lex spesialis UU No. 07 Tahun 2012. - Pengetahuan teknis penyelidikan dan penyidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP - UU Polri - UU No.07 Tahun 2012 DII
3.	Lantas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan arus lalu lintas. - Mengamankan, menjaga dan mengatur arus lalu lintas. - Melakukan pengawalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan - Patroli, DII 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Polri - UU Lalu Lintas - DII
4.	Dokkes	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan ambulan. - Menyiapkan tenaga medis. - DII 	<ul style="list-style-type: none"> - P3K - Kemampuan teknis kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 tahun 2002 - UU No. 9 tahun 1998
5.	Bimas	<ul style="list-style-type: none"> - Negosiasi - Penggalangan - Pendekatan kepada massa 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati DII 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 tahun 2002 - UU No. 9 tahun 1998

6.	Brimob	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan pasukan huru-hara - Menyiapkan peralatan yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Respon - Gakum Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 tahun 2002 - UU No. 9 tahun 1998 - Perkap No. 1 tahun 2009 - Perkap tahun 2006 tentang pedoman Dalmas - PROTAP/1/X/2010 penanganan Anarki.
----	--------	--	--	---

Tahap III: Pasca Insiden Kekerasan

No.	Satuan Fungsi	Ativitas yang dilakukan	Ketrampilan yang dibutuhkan	Dasar Hukum
1.	Bimas	<ul style="list-style-type: none"> - Perundingan secara damai - Rekonsiliasi - Pemulihan psikologis, sosial ekonomi, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Psikolog - Mediasi - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 tahun 2002 - UU No 07 Tahun 2012
2.	Humas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitaan - Cover media, - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Media 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 Tahun 2012 - UU No. 07 Tahun 2012

BAHAN BACAAN II

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN BERDASARKAN FUNGSI

Oleh: Kombes Pol. DR. Chryshnanda Dwi Laksana, MSi

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari masyarakat majemuk, lebih dari lima ratus suku bangsa ada didalamnya. Masyarakat majemuk yang dibentuk oleh beraneka ragam suku, agama, kebudayaan yang bersatu dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik yang sangat kompleks. Mereka dipersatukan oleh sistem nasional sebagai sebuah masyarakat negara sebagai bangsa atau *nation*. Mereka hidup berkembang dengan kebudayaan masing-masing namun telah dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia menjadi Bhineka Tunggal Ika.

Meskipun demikian, kondisi semacam ini sangat rawan akan terjadi konflik yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam kehidupan bersama, tiap-tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kepentingan-kepentingan yang berbeda itu bertentangan satu sama lain, maka konflik akan terjadi. Oleh sebab itu, konflik sering diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih, pada tataran individu ataupun kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan (*Irfan Abu Bakar, Modul Resolusi Konflik*).

Perbedaan kepentingan yang tidak dikelola dengan bijaksana bisa menimbulkan konflik. Konflik sosial bisa muncul karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam, ekonomi, sosial, politik antara individu-individu dan anggota komunitas setempat (*Dahrendorf, 1959, Suparlan, 1999*). Konflik juga muncul disebabkan oleh aturan main yang tidak adil didalam proses kompetisi untuk menguasai sumber daya alam.

Pengertian konflik sesuai Undang-undang Penanganan Konflik Sosial adalah: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik memang tidak selalu identik dengan kekerasan, namun terkait dengan konteks konflik yang akan ditangani oleh kepolisian, maka pengertian konflik sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 7 tahun 2012, itulah yang akan menjadi acuan. Konflik bisa mengarah negatif ketika pihak

yang berkonflik berupaya untuk memperoleh dukungan dari pihak lain dengan menggunakan segala cara, termasuk sentimen atas nama kesamaan kelompok, suku, asal daerah, agama, ras bahkan yang kerap terjadi adalah kesamaan kepentingan. Dukungan secara membabi buta kepada salah satu pihak kerap muncul dan menjadikan konflik semakin meluas, bahkan ia bisa lepas dari akar masalah yang melatarbelakanginya.

Konflik bisa berkembang dengan sangat liar tak terkendali dan berubah wujud seolah olah menjadi konflik antar suku, antar agama, antar kampung. Dengan demikian, sejatinya konflik itu bisa dengan sengaja diciptakan dengan cara memanfaatkan kelompok-kelompok primordial (atas nama suku, agama, ras, asal daerah) yang rentan secara tidak bertanggungjawab.

Kelompok-kelompok ini memang terus tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Minimnya lapangan kerja, tingginya tingkat pengangguran hingga semakin lebarnya jurang perbedaan akibat tingkat pendapatan antara yang kaya dan miskin, termasuk perlakuan yang tidak sama dimata hukum adalah sumber masalahnya. Kelompok primordial ini ibarat api dalam sekam, mereka menyimpan amarah dan kekecewaan yang terpendam dan kapan saja bisa dengan mudah meledak. Kelompok ini kurang rasional, emosional, sangat mudah marah apabila dipicu dengan sentimen pelecehan agama, suku, ras dan sebagainya.

Konflik yang bernuansa agama tidak terjadi karena perbedaan visi dan ideologi antar pemeluknya. Konflik bernuansa agama sengaja dimunculkan sebagai tindakan kamuflatif untuk menyuarakan kepentingannya. Konflik bernuansa agama memang begitu mudah untuk menyulut kebencian, memperoleh dukungan, padahal ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah mereka yang lemah, minoritas dan miskin.

Konflik bisa berkembang menjadi masalah sosial yang sangat serius jika tidak bisa dikendalikan dengan benar. Konflik menjadi besar manakala tidak ada perantara (mediator) yang mampu bertindak dengan tidak memihak, yang dihormati oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Konflik juga membutuhkan orang yang bisa menjadi perunding (negosiator) dari salah satu pihak yang dapat bertindak adil terhadap kedua belah pihak. Ia harus mampu menjembatani perbedaan-perbedaan antar berbagai pihak yang sedang berkonflik, sehingga mampu memberikan kompensasi-kompensasi sebagai ganti rugi atas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pihak yang merugikan (*suparlan 1999*).

Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah sebagai Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No 2 / 2002. Pasal 2).

Dalam struktur kehidupan masyarakat, polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi sebagai pengayom, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban warga dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tertib (*Bachtiar 1994:1*).

Dengan kata lain, aktifitas polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan anggota masyarakat (*Suparlan 1985:61-73*). Keberadaan polisi dalam suatu masyarakat haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Problematika sosial yang terjadi di tiap-tiap masyarakat juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, meskipun fungsi polisi secara umum sama, namun prakteknya bisa sangat berbeda-beda dalam hal cara menerapkan fungsi-fungsinya. Polisi yang ideal adalah diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya (*Satjipto Rahardjo, 2000*)

Pemolisian (*policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi, pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai pemolisian yang efektif, diperlukan model pemolisian yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat, kebudayaan serta lingkungan yang dihadapinya. Variasi gaya pemolisian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua;

Pertama, adalah pemolisian konvensional atau pemolisian tradisional. Model ini lebih menekankan pada aktifitas kepolisian untuk mencapai kondisi aman dan tertib dengan cara tindakan kepolisian yang reaktif dan proaktif, dan lebih menekankan pada proses penegakan hukum untuk memerangi kejahatan.

Kedua adalah pemolisian modern yang merupakan antitesis dari pemolisian konvensional. Para penganut model ini sepenuhnya menyadari akan keterbatasan yang dimiliki untuk bisa mencapai tujuan kepolisiannya. Oleh karena itu, mereka lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, memaksimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat, membuka pintu

partisipasi masyarakat dan selalu berorientasi pada pemecahan masalah ketika melihat persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

Mengingat bahwa permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat majemuk di Indonesia ini begitu kompleks, maka untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem yang holistik, sistemik (sebuah kesatuan yang bulat dan menyeluruh), maka dibutuhkan kemampuan polisi yang mampu mengidentifikasi masalah, meneliti, menganalisis dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Salah satu ciri yang Kepolisian Republik Indonesia pasca terpisah dari TNI adalah menjadi Kepolisian sipil dengan meninggalkan kultur militeristiknya dan selanjutnya menjadi pengayom, penegak hukum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di dalam prakteknya, Polisi selalu bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Dalam pemberian layanan kepolisiannya, polisi juga akan selalu berkonsultasi dengan masyarakat, sehingga prioritas layanan yang diberikan bisa benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Model Pemolisian Masyarakat (Polmas) inilah yang saat ini terus berupaya diterapkan oleh Polri.

Pada tahapan operasional kepolisian, ada lima langkah yang harus dilakukan oleh setiap anggota polisi dalam penerapan Polmas, yaitu ;

1. Mengamati atau mengobservasi fenomena dilingkungan tugasnya dengan cermat. Dalam proses obeservasi polisi harus mampu menangkap gejala dalam suatu peristiwa lengkap dengan data-data sebagai informasi penunjang.
2. Melakukan analisis atas semua gejala dan peristiwa yang terjadi secara kritis.
3. Mampu melihat, meramalkan hubungan antar gejala dan peristiwa yang terjadi dengan logis sehingga bisa menyiapkan upaya-upaya pencegahan
4. Mengidentifikasi akar masalah dari setiap ancaman keamanan dan ketertiban yang yang terjadi, lalu berusaha mencari solusi bersama warga masyarakat yang potensial untuk diajak kerjasama
5. Mengembangkan pemolisian yang kreatif, bisa diterima oleh masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan memperoleh dukungan dalam upaya penciptaan kamtibmas dalam rangka peningkatan kualitas hidup warga.

Jadi, secara umum, fungsi Kepolisian adalah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan yang terganggu akibat konflik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok. Kehadiran polisi diharapkan bisa mewujudkan rasa aman, nyaman bagi warga masyarakat sehingga

produktifitas warga bisa dijamin untuk mendorong peningkatan sumberdaya ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Fungsi lainnya adalah sebagai penegak hukum, untuk memerangi kejahatan, mengayomi dan melayani masyarakat dari ancaman kejahatan yang mengganggu dan merugikan dari pihak lain. Sedangkan fungsi sebagai pemelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, menuntut polisi untuk selalu ada dan berhubungan dekat dengan kehidupan warga masyarakat yang dilayaninya. Polisi harus mampu mendeteksi semua kejadian sekecil apapun yang terjadi di lingkungannya. Interaksi yang baik antara polisi dan warga menjadi prasyarat utama untuk keberhasilan tugas-tugas polisi.

Polisi dan Penanganan Konflik

1. Pra Konflik

Dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditegaskan mengenai mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Pada pasal 8 disebutkan, penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Hasil musyawarah mufakat mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan implementasi Polmas yang dikembangkan oleh Polri. Dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Polmas pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti: model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Masyarakat sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib sebagai ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka. Situasi ini difasilitasi oleh petugas Kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

Implementasi Polmas dalam rangka pencegahan dini konflik bernuansa agama menjadi sangat relevan. Polisi dari fungsi apapun harus memahami dan mengimplementasi model Polmas berbasis kawasan (*geographical community*) ataupun model Polmas berdasarkan *community of interest*. Polisi harus mampu membangun kemitraan dengan warga, menciptakan jejaring dengan seluruh komponen di masyarakat, bekerja secara proaktif, penuh inisiatif dan berorientasi pada pemecahan masalah daripada penegakan hukum.

Pola kedekatan hubungan yang dibangun harus mampu menyerap aspirasi warga dengan tepat, sehingga prioritas layanan yang diberikan oleh polisi bisa sesuai dengan kepentingan warga. Pola kedekatan hubungan yang sejajar antara polisi dengan warga akan sangat membantu polisi dalam mendeteksi semua informasi yang muncul terkait dengan dinamika warga yang terus menerus terjadi di tengah-tengah warga. Manakala semua kejadian bisa terpantau dengan baik, maka tindakan kepolisian bisa tepat sasaran, akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi hukum maupun moral.

Salah satu cara yang dikembangkan oleh Polri untuk mencegah terjadinya konflik adalah melalui penerapan strategi Pemolisian Komunitas. Fungsi Bimmas menjadi ujung tombak kepolisian dalam membangun hubungan sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Bimmas menjadi telinga dan mata kepolisian dalam mendeteksi seluruh perkembangan informasi yang ada di masyarakat. Bimmas juga menjadi corong Kepolisian untuk mensosialisasikan semua informasi kepolisian kepada warga masyarakat.

Petugas Bimmas harus mampu membuat dan menguasai peta wilayah alias Peta Kamtibmas yang berisi tentang potensi kejahatan, potensi sumber daya manusia, identifikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ormas yang bisa diajak kerjasama. Petugas Bimmas harus aktif melakukan komunikasi, berkunjung ke warga, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh warga, membangun jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang afektif adalah komunikasi dari hati ke hati yang dilandasi ketulusan dan kejujuran. Keberadaan polisi hendaknya bisa menumbuhkan rasa aman dan menyenangkan bagi seluruh. Seluruh informasi yang dihimpun oleh petugas Bimmas akan menjadi basis tindakan kepolisian.

Dalam konteks penanganan konflik bernuansa keagamaan, Polisi harus peka, peduli dan mampu bertindak sebagai aparat negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menjaga ketertiban, penegak hukum, pelayan masyarakat yang dapat dipercaya serta mampu menjembatani proses dialog antar pihak yang sedang terlibat konflik. Peran itu bisa dilakukan oleh polisi

manakala polisi mampu menjadi tauladan dalam hal ketaatan terhadap hukum dihadapan warga masyarakat.

Dalam perannya sebagai pengayom dan penjaga ketertiban, Polisi harus mengenal secara baik para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktifis politik, aktifis ormas, organisasi kepemudaan, hingga bisa menjadi mitra kerja kepolisian yang bisa turut serta dalam rangka menciptakan rasa aman dari ancaman kejahatan. Dalam konteks inilah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat itu dibangun. Antara polisi dan warga saling bahu membahu untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

2. Penanganan Konflik

Pada saat terjadi konflik antar warga, tindakan kepolisian yang harus diambil oleh masing-masing fungsi adalah sebagai berikut;

- a. Fungsi Intelkam; melakukan deteksi dini, melakukan pemantauan, pemotretan, identifikasi terhadap situasi keamanan di wilayah konflik serta memberdayakan potensi para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam meredam situasi konflik.
- b. Fungsi Patroli, Lalu lintas dan Sabhara; melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, perlindungan terhadap individu dan kelompok yang berpotensi menjadi korban dalam konflik. Melakukan pengaturan lalu lintas, mulai dari pengalihan jalan, pengaturan arus, penutupan dan pembukaan akses jalan untuk menghindari ancaman yang bisa menimbulkan korban.
- c. Bimmas, Intel dan Reskrim juga bisa berperan sebagai perantara (negosiator) yang bertugas menjembatani proses dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka juga harus melakukan pemantauan serta mengeluarkan himbauan kepada para pihak agar menaati hukum, tidak menggunakan kekerasan yang dapat membahayakan keteteraman dan keselamatan umum.
- d. Reskrim; merekam setiap tindakan para pihak yang terlibat konflik, mengumpulkan barang bukti, mendeteksi setiap perkembangan kejadian, mengidentifikasi saksi-saksi yang melihat, mendengar kejadian. Jika diperlukan bisa mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana (pelaku kekerasan yang merugikan orang lain) dengan cara menangkap dan mengamankan pelaku untuk selanjutnya diproses secara hukum.
- e. Satuan Dalmas dan Brimob; menghentikan dan membubarkan para pihak yang tidak mengindahkan himbauan dan peringatan polisi. Jika ada pihak yang melakukan tindakan anarki yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertentangan dengan hukum

yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain, maka Polisi harus menggunakan kekuatan dan pengerahan daya untuk menanggulangi anarki secara tegas dan terukur sesuai undang-undang.

3. Pasca Kejadian Konflik

Semua tahapan kepolisian sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah oleh masing-masing fungsi tanpa terkoordinasi. Tindakan kepolisian harus tetap dilakukan satu garis komando yang dikendalikan dengan pengawasan yang ketat oleh Komando Pengendali yang dipimpin oleh Kasatwil, Kasatfung dan/atau pimpinan satuan lapangan. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tindakan kepolisian yang dilakukan anggota kepolisian. Fungsi Propam bertugas membantu Kepala Polisi dalam menegakkan aturan dan disiplin anggota kepolisian (Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang penanggulangan anarki)

BAHAN BACAAN III

CERITA DARI BEKASI:

Pengalaman Kapolres Bekasi, Kombes Edward Syah Pernong dalam Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan di Kota Bekasi

Berkaitan dengan perlindungan polisi dalam konflik bernuansa keagamaan dan kesempatan kali ini saya akan lebih banyak menyampaikan pengalaman di kewilayahan selama menjabat Kapolres. Saya ingin menyampaikan masalah pada saat saya bertugas di kewilayahan dan langkah-langkah dalam menangani permasalahan. Tentu ini adalah pengalaman pribadi dalam bertugas, yang juga dialami oleh rekan lainnya atau akan dialami nantinya oleh rekan-rekan yang masih junior. Pada saat kita di lantik menjadi Kapolres, maka pada saat itu pula seorang polisi menjadi penanggung jawab keamanan di suatu wilayah.

Rekan-rekan semua, sebagai polisi yang tentu menjadi pelindung, pengayom masyarakat dan penegak hukum karena itu semua adalah bagian dari tugas kepolisian. Saat pertama kali saya ditugaskan di satu daerah, pertama saya langsung membuat pertanyaan kritis mengenai wilayah tersebut. Di situ kita lihat berdasarkan spesifikasi wilayah, kondisi dan pemantauan wilayah.

Saat bertugas di Bekasi, sebelum saya dilantik saya berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan, kemudian Wakapolres tentang persoalan di sana. Umum dipahami oleh masyarakat bahwa tugas polisi yaitu menangkap maling. Pertanyaan saya adalah bagaimana ada kejahatan apa di sana? Ini karena latar belakang penugasan saya yang banyak di Reserse. Mungkin akan berbeda jika sebelumnya saya bertugas di Binmas, yang saya tanyakan adalah bagaimana kondisi masyarakat di sana. Saya juga bertanya kepada rekan-rekan Intel Polda pemantuan mereka tentang Bekasi.

Pada saat dilantik, maka disitulah pertanyaan kritis dimulai. Pertanyaan kritis saya yang pertama yaitu, kebetulan berbarengan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yaitu bagaimana caranya pesta demokrasi ini berjalan aman dan damai. Pertanyaan kritis kedua, saya sudah memperoleh masukan mengenai kentalnya friksi horizontal terkait masalah keagamaan di Bekasi. Karena itu bersifat laten, khususnya rumah ibadah.

Di Bekasi, masyarakatnya sangat agresif dengan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat. Di sana ada namanya FBR dengan dua juta (2

juta-an) anggota yang dipimpin oleh KH. Muhammad Fadoli. Ada di setiap tempat. Walau dengan Anggaran dasarnya baik, tetapi mereka ada ditempat-tempat remang, deep kolektor, pasar. Tetapi juga ada FBR yang baik jadi DPR, aktif di masjid-masjid dan ini cukup memberikan warna terhadap kehidupan masyarakat.

Di Bekasi juga ada FPI. FPI di sana tidak banyak tetapi FPI pusat di Jakarta bisa di ekspor dengan cepat ke wilayah Bekasi. Dan FPI itu membanggakan kekerasan artinya apabila ada persoalan keagamaan mereka cepat sekali datangnya karena merasa itu tugas mereka apabila tidak bisa kita tangani siapa lagi.

Mendekati Tokoh Kunci

Habib Riziq itu tawadhu' sekali, rendah hati. Jadi jangan kita melihat dia seorang yang keras. Dan pintar, alim, wawasan keagamaannya luas dan persoalan toleransi dia bisa juga ngomong. tapi dia memang lebih *strength*. Silakan melakukan, tapi jangan sentuh ini. Dan kalau disentuh dia akan cepat bereaksi.

Di sana (Bekasi) ada tokoh masyarakat di Forum Betawi, justru menjadi tokoh karena berada di sekeliling orang yang taat dan pengurus-pengurus masjid, sehingga dia perlu mempertahankan posisi itu dengan tampilan-tampilan yang religius. Kemudian ada juga PKS, mohon maaf kalau di sini ada PKS tetapi PKS itu memang saat itu yang saya alami, susah betul di pegang, pokoknya yang penting favorit, PKS waktu itu ngetren dan itu yang dilakukan dan saat itu dipimpin oleh H Nur Wahid, orangnya Intelek, demokratis, pintar dan soal toleransinya juga sangat bagus.

Jadi kita tidak bisa mencep kelompok itu langsung dengan mengatakan intoleran atau keras sebab kalau kita turun dan bersentuhan langsung dengan mereka, ada orang-orang yang sosok dan pemikirannya sangat bagus, tapi pada tingkat *grass root*, jadi ada missing link di organisasi tersebut. Sehingga itulah kita harus bisa membuat tataran tertentu. Artinya pada tataran ini anggota yang berbicara. Tetapi pada tataran pimpinan atau tokoh seperti KH Fadoli, Habib, Hidayad Nurwahid tidak bisa diserahkan dengan kasat intel dan kasat lain, harus kita (Kapolres) yang bertemu dengan mereka. Karena batas-batas mereka – Kasat, Kapolsek - hanya persoalan keamanan. Kenapa harus Kapolres, karena kita akan berbicara hal-hal strategis kedepan dengan persoalan-persoalan aktual dan menanyakan persoalan kejadian-kejadian sebelumnya dan kita bisa mengajak mereka apabila ada persoalan-persoalan yang mereka alami untuk mengkomunikasikan dengan kita.

Kemudian di Bekasi ada pilot project *community policing* dari JICA dan itu menjadi tolak ukur keberhasilan, karena program ini sudah dilakukan

sebelum saya jadi Kapolres dan jika program ini tidak berhasil, berarti saya gagal di sana. Oleh karena itu bagaimana mengkomunikasikan kebijakan dan bagi saya itu perlu harus bisa diakselerasi lebih dari sebelumnya.

Berikutnya tentang *crime index* yaitu Curas dan Curat yang perlu diselesaikan. Setelah itu hubungan dengan TNI selama saya bertugas saya komunikasikan dan konsentrasi saya. Selama saya bertugas, saya terus berkomunikasi karena: *Pertama*, mereka bisa membantu kita. *Kedua*, mereka tidak membantupun tidak masalah, ngurus mereka saja kita susah nanti.

Misalnya diprapatan, mereka datang, melanggar, karena melanggar lalu di sempit oleh petugas, karena tidak kelihatan memakai seragam mereka langsung mengatakan “ada apa, saya tentara”. Bukan soal ada apanya, tapi anggota kita dipermalukan di jalanan. Atau mereka memakai mobil JIP mendekati ke pos polisi dan sengaja yang melanggar. Ulah seperti ini satu persoalan sendiri dalam tugas-tugas dilapangan. Nah, ini perlu kita berkomunikasi antar pimpinan TNI, bahkan kalau perlu keakraban kita sebagai pimpinan Polres dengan pimpinan TNI harus mereka lihat (anggota). Ini bukan persoalan sepele, sebab anggota kita bisa diremehkan, kalau Babinsa, Danramil itu tidak mendukung dengan program kita, mereka memusuhi program kita. Masyarakat bisa di provokasi. Karena itu harus dibangun hubungan yang baik (menjadi atensi pimpinan: Kapolres).

Membaca Daerah Operasi

Dan selanjutnya pertanyaan kritis saya adalah bagaimana kita menjawab isu-isu aktual. Bagaimana membaca analisa daerah operasi dan intel dasar. Setelah serah terima jabatan itu semua harus dibaca, jadi kan ada kolektif sejarahnya, ada berapa banyak konflik-konflik horisontal yang berkaitan dengan kasus keagamaan yang terjadi. Saya itu saya lihat seberapa sering terjadi konflik-konflik horizontal atau bernuansa keagamaan. Saya lihat daerah operasi, ada petanya. Panggil kasat intel, kemudian panggil kanit-kanit intel dari daerah-daerah yang rawan. Dari sini bisa di petakan, mana (konflik/persoalan) yang sedang mengemuka? Sekarang ini kelihatannya dan dulu pernah terjadi.

Yang menguat saat ini, kasus gereja Sanmaekel (Bekasi Barat), kemudian di Bantargebang, ditempat ini situasinya tegang tepi belum ada insiden, di Tambun dan di derah Cibitung. Kapolseknya saya panggil. Di Cibitung ternyata Kapolseknya orang Batak, Nasrani, Hotman Sirait namanya. Dia merasa susah, karena dia Nasrani dan karena itu ingin pindah. Saya bilangin ke dia, kemampuanmu sebagai seorang Polisi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan tentunya saya akan turun menghadapi masalah ini.

Setelah saya petakan, saya memanggil tokoh masyarakat untuk salat subuh bersama. Tapi H minus 2 sebelum itu saya melakukan operasi miras, judi, PSK dan preman. Setelah sholat subuh bersama, yang pertama kali memecahkan botol atau menggilas botol-botol itu adalah mereka para haji, kiai dan ustadz. Setelah itu para pendeta dan pastur datang untuk mengikuti penggilingan atau pemusnahan Miras. Kemudian kita jelaskan operasi kita terhadap preman, operasi kita terhadap PSK dan juga penangkapan judi. Ini untuk memberikan kesan pertama yang baik bagi saya.

Kemudian setelah itu saya ajak mereka makan pagi (sarapan) di rumah jabatan. Setelah makan pagi saya minta para tokoh masyarakat berbicara, lalu kita membuat kesepakatan bersama untuk menjaga Bekasi ini agar tetap damai dan kondusif. Kita harus mengetahui betul tokoh yang bisa menangani permasalahan. Tokoh yang disegani oleh masyarakat, atau yang memiliki pengaruh kuat. Kita harus memegang betul tokoh-tokoh itu baik tokoh lokalnya dan ada juga orang-orang yang disegani di masyarakat karena dia anaknya pendekar. Kita juga harus melihat pergerakan massa kalau ada masalah dari mana massa bergerak. Ada tokoh pemuda disana, itu juga harus kita dekati.

Langkah berikutnya yaitu kita harus turun langsung. Kita inventarisi, misalnya masalah Tambun dan Cibitung. Persoalan gereja, saat saya masuk sebagai Kapolres, ini sudah mulai. Jadi kadang-kadang ribuan massa yang datang dari beberapa daerah di Bekasi dan Kerawang mau merusak dan menghancurkan gereja di Bekasi. Saya menurunkan personel yang banyak. Ada juga yang waktu saya masuk sedang laten, tapi yang ditangani yang sudah bergejolak dahulu.

Saya terus berkomunikasi setiap saat (siang malam), saya seringkali malam-malam, kadangkala jam 1 atau 2 pakaian dinas berkeliling. Saya temui tokoh-tokoh, kemudian orang-orang yang paling dekat dengan gereja itu (tetangga). Saya sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah itu mengatakan jadilah tetangga yang baik. Gereja ini sudah ada beberapa tahun yang lalu (sudah 15 tahun) pak, artinya 15 tahun yang lalu *engkong* (kakek-kakek) kita dulu tidak ada masalah. Apa yang disampaikan oleh junjungan kita, Rasulullah untuk menjalin silaturahmi (persaudaraan), menjaga kebaikan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Ini kan perintah, hadisnya Rasulullah. Artinya, kalau dulu *engkong* kita tidak baik berarti gereja ini tidak akan berdiri disini. Akhirnya dengan memberikan pengertian seperti itu mereka bisa memahami.

Di Tambun juga ada tokoh dan sekaligus pengusaha yang punya massa, H. Mambang dan ini lah yang saya dekati, saya katakan kepadanya, pak Haji ternyata dari mana-mana dikenal yang paling hebat disini, kalau ada batu

yang jatuh digereja itu apa nama pak Haji terkenal. “Oh iya” katanya. Karena itu saya bilang, massa yang datang itu bukan dari sini, tapi dari Karawang. “Apa mereka tidak menganggap pak Haji”? tanya saya. “Oh begitu pak Kapolres” jawabnya. Kalau begitu nanti saya yang selesaikan pak. Akhirnya dia mau ikut menyelesaikan persoalan ini. Begitu juga dengan tokoh lain yang mempunyai pengaruh masa.

Strategi Potong Kambing

Saya selalu memakai cara setiap datang ke tokoh, saya membawa kambing dua dan minta ke Kanit untuk mendatangkan anak yatim dan orang tua dan saya bagaikan dengan mereka dan saya memotong sendiri kambingnya. Satu untuk dimakan bersama satunya lagi untuk mereka bawa ke panti. Saya kebetulan jago potong kambing. Saya kumpulkan masyarakat dan berbicara sambil makan dengan mereka.

Akhirnya persoalan Cibitung yang pada hari H massa dari luar berdatangan akhirnya dibentengi oleh massa dari haji Mambang dan haji Junaedi tadi yang tidak kalah cukup banyak. Haji berdua ini akhirnya datang ke Karawang menemui tokoh-tokoh disana dan menyampaikan bahwa urusan gereja di Bekasi biarlah kami yang tangani. Dan akhirnya mereka kembali.

Ada juga tokoh-tokoh muda yang keras, ngomong-ngomong pun tidak bersahabat. Nah pada mereka ini saya gunakan orang yang bisa mempengaruhinya. Saya dating ke Haji Fadholi (Ketua FBR). Saya tidak mengundang dia, tapi langsung saya datangi. Kebetulan menjelang Idul Adha, jadi saya datang bawa sapi dan saya berbicara, istilahnya nitip masalah anak-anak muda diwilayahnya. Dia bilang, pak Kapolres antum jower, antum ketok itu anak-anak FBR kalau nakal disana. Punya hak anda. Kalau ada yang naka kasi tau ane.

Saya sampaikan itu yang ada di Cibitung itu haji Mambang dan haji Junaedi sudah kondusif karena ada sudah sejak engkongnya gereja itu berdiri. Karena itu massa yang datang dari Karawang mau demo. Saya juga tersinggung kalau orang Karawang mau ikut-ikutan di Bekasi.

Salah satu cara menunjukkan atensi kita yaitu dengan terus datang setiap kejadian, dan saya terlebih dahulu mendatangi tokoh (haji-haji) di sana dengan pakaian lengkap sebelum subuh sudah di lokasi. Jadi mereka kaget, pak hajinya sendiri masih pakai sarung, saya sudah pakai pakaian dinas lengkap menunggu di tempatnya menjelang sholat subuh. Akhirnya dengan langkah itu persoalan mudah dikomunikasikan. Sampai sekarang mereka tetap berkomunikasi dan saya sarankan bagi pihak gereja agar dalam

kegiatan datang ke tokoh di sana, membawa kue, ada perayaan silaturahmi kesana lakukan dengan baik. Sampai sekarang itu akhirnya aman.

Saya mengibaratkan di satu tempat ada singannya, sekarang bagaimana caranya singa menjaga hutan dan hutan melindungi keberadaan singa, ini artinya ada sinergi (simbiosis mutualisme). Kita harus menjadi fasilitator di sana. Setelah persoalan itu selesai harus kita mengintensifkan hubungan itu dan kita ingatkan terus agar bisa menjaganya. Karena kalau tidak, akan muncul juga dan harus dipantau di sana anggota (intelejen) yang mengcovernya secara khusus wilayah itu.

Mengambil Tindakan

Seminggu setelah kasus selesai, ada penghancuran rumah di Tambun. Hancur betul rumah itu. Rata dengan tanah. Saya datang sudah ribut. Tapi dari intelijen dan Kapolsek kita sudah tau siapa provokator-provokatornya selama ini. Kalau sudah begini kita harus berani bertindak. Tapi, keberanian kita itu harus juga dihitung. Misalnya, kalau dilakukan langkah-langkah, siapa yang bereaksi.

Akhirnya saya datang lagi ke H Fadholi menyampaikan ini ada kejadian begini-begini. Saya sampaikan bahwa saya akan melakukan langkah-langkah begini-begini. Oh iya katanya, dipersilahkan. Lalu dilakukan penindakan dan didapat 70 orang, mereka di tahan. Pada saat itulah muncul rekan-rekan dari PKS. Jam 1 malam, Purwadi (wakil saya) bilang kepada saya itu ada anggota DPR, mereka tidak mau pulang. Mereka meminta penangguhan penahanan. Saya bilang tidak bisa, ini sudah kemana-mana, termasuk ke Poldametro. Saya persilakan mereka tidur di Polres. Saya bilang ke mereka, ini tidak akan saya lepaskan. Kemudian saya dating ke pak Hidayat Nur Wahid. Dan akhirnya pak Hidayat bersedia untuk terlibat menyelesaikan persoalan tersebut.

Pada saat menyelesaikan Tambun, tiba-tiba di Bantargebang dihancurkan juga. Itu rumah pendeta Simanjuntak. Pendeta batak kan punya istri, ada anaknya lulus sekolah dan melakukan kebaktian kecil di rumahnya. Bagi masyarakat sana itu langsung di hancurkan.

Dari sini saya bisa memahami bagaimana pentingnya pemahaman atmosfir wilayah. Kalau situasinya sudah panas, apa pun bisa jadi pemicu. Jadi wilayah Bekasi saat itu panas sekali. Kalau boleh dibilang kecolongan, ya kecolongan betul. Karena tidak pernah ada gejala apa-apa disana.

Saya kecolongan karena sebelumnya saya menfokuskan untuk menjaga pembangunan gereja tapi malah pada malam harinya rumah seorang pendeta yang melakukan kebaktian untuk anaknya diserang massa. Dan kita akhirnya kita tahan orang-orang yang melakukan itu. Ada sekitar 60 orang kita ambil

dan tahan. Itu PKS kencang lagi. Akhirnya kita jembatani dengan tokoh-tokoh PKS.

Saya minta ke Kasat Serse semua yang terlibat mulai dari pengusaha, tokoh-tokoh dan pelaku-pelakunya untuk diproses. Termasuk ada orang Pemda, akhirnya negosiasi bisa dilakukan. Ternyata pendeta itu yang datang kesaya meminta penanggungan penahanan. Saya bilang ke dia, anda diancam. Pendeta bilang tidak, ini betul-betul dari saya.

Akhirnya pengusaha itu mau membangun kembali tapi saya katakan sewakan gratis sebuah ruko untuk kebaktian dan saya katakan kepada pendeta nanti kalau kebaktian di sana agar memberikan peran (kontribusi) terhadap masyarakat, semisal kalian kan banyak, setelah kebaktian anda makan di sekitar warung-warung sana saja, persoalan parkir dipasrahkan sama orang-orang sana dan ini mereka setuju. Akhirnya orang-orang kampung senang sekali. Yang parkirpun dan yang kebaktian tidak hanya memberi seribu tapi lima ribu bahkan bisa lebih. Akhirnya di sana aman. Setiap kali saya ke sana, saya dipeluk oleh pendeta dan mengucapkan terimakasih.

Kasus Sanmaekal

Ada kejadian yang bisa kita antisipasi (kasus Cibitung), tapi ada juga yang tidak bisa diantisipasi, seperti kasus Bantargebang. Kasus gereja Sanmaekel gereja lama di Bekasi. Dia melakukan rehab. Sebenarnya kita pantau terus. Intelejen memonitor terus. Tapi konotasinya, rehab itu seperti membangun gereja baru. Tiba-tiba 4 hari kemudian ada laporan intelijen ke saya bahwa pada hari paskah di depannya akan ada tabligh akbar yang dihadiri oleh kiyai Fadoli dan Habib riziq. Mereka menganggap ini pembangunan gereja yang ada muatan missionarisnya. Ya, kira-kira mau mengkristenkan orang Islam (kristenisasilah). Yang paling keras adalah tokoh Dewan Dakwah. Saya inventrisir dan cek kekuatannya.

Satu hari sebelum hari H saya datang ke sana. Seperti biasa saya membawa 5 kambing untuk daerah sekitar. Ngumpulkan orang-orang, saya tidak katakan karena mau ada aksi besok. Anak-anak muda sana senang sekali, mereka masak-masak, goreng dan sebagainya. Di salah satu tokohnya saya mengajak makan bersama dengan memesan nasi bungkus. Sambil kita makan bersama, saya berbincang-bincang dengan mereka mengibaratkan kita makan dengan menggunakan satu piring. Yang mana kalau piringnya kotor kita tidak akan mau makan dan begitu misalnya kalau piring itu ibarat kampung maka kalau kampung kita kotor tentunya kita tidak akan suka apalagi yang mengotori orang lain.

Dan pada malam harinya saya terus memantau, saya keliling dan hari H datang ribuan dari berbagai massa (FBR, FPI, Jundullah & Laskar Ababil)

dan pada saat itu saya cari H Fadoli kerumahnya dia tidak ada dan jarak tabliq akbar dengan perayaan paskah sangat dekat dan saya dapat laporan dari intelejen akan nada serangan dari kelompok yang sudah siap untuk menyerang dan mereka akan langsung kabur. Jaraknya sangat dekat antara gereja dengan lokasi tabligh akbar.

Niatan saya baik dan saya berpasrah kepada Allah SWT akan memberikan petunjuk. Saat itu saya tidak pakaian dinas, harusnya saya pakai pakain lengkap soalnya dari tadi malamnya saya terus berkeliling sehingga tidak ada lagi pakain dinas karena lecek. Saya tanya, ini lagi apa, kebaktian katanya. Suasana betul-betul mencekam. Parker-parkir juga sudah tidak ada. Saya akhirnya masuk ke gereja. Dia (romonya) berhenti kabaktian dan mendatangi saya. Dia mengharapkan sekali polisi pada saat itu. Betapa besar harapannya kiranya polisi bisa mengayomi, memberikan kedamaian, melindungi dia saat itu. Padahal saat itu sedang paskah, sampai turun Romo itu.

Saya datang dan naik ke mimbar, mengucapkan selamat paskah didampingi Romo. Saya juga sampaikan disana ada kegiatan, tidak ada masalah. Kalau sampai ada batu yang terlempar ke sini, maka sudah ada kapolres di sini. Kalau ada batu terlempar kesini copot saja saya jadi Kapolres karena berarti saya tidak mampu mengamankan Bekasi ini. Tenang saja saya bilang. Saudara-saudaramu disana sedang melakukan tabligh akbar. Tidak ada masalah. Isu-isu yang disampaikan orang-orang jangan dipercaya, saya penanggungjawab keamanan disini. Anggota yang berjaga disana sebentar lagi saya bubarkan. Karena tidak ada masalah disana.

Saya sampaikan ke anggota, buka kira kanan. Jangan kelihatan anda menjaga. Sampai disana, karena dekat saya sudah lihat haji Fadholi, tinggal Habib Riziq yang belum datang. Semua bicara kristenisasi. Setelah itu saya dekati Kiai Fadholi, saya bilang Kiai saya datang ke rumah, iya ane lagi disini. Saya lalu bicara juga di tabligh itu. Saya sampaikan bahwa saudara-saudaramu disana sedang kebaktian dan saya menjadi tidak nyaman karena saudara-saudaramu disana melaksanakan paskah dengan suasana yang mencekam. Ini tidak baik saya bilang. Negara ini bukan milik satu dua orang. Bukan milik satu kelompok. Lihat itu jalan-jalan, ada namanya simanjuntak adalagi yang lain. Simanjuntak itu medan, Kristiani. Ada juga Kiai Ahmad Dahlan dan sebagainya, artinya Negara ini milik kita bersama.

Sekarang begini, anggaplah disana, Sanmaikel mau melakukan kristenisasi. Bagaimana caranya mengatasi? Perkuat saja iman kalian. Anak-anak istri kalian bina. Kalau kalian bereaksi berarti kalian tidak percaya diri. Saya katakana juga kepada mereka, bahwa saya tidak main-main kalau

sampai ada anarki disini. Sekali batu itu jatuh di sana, seluruh dunia muncul berita bahwa batu jatuh digereja.

Setelah saya bicara di mimbar, naiklah haji Fadoli, dia tidak bicara banyak. Saduara-saudaraku, kalau ane ini, kalau merah kata Kapolres berarti merah juga kata FBR, kalau putih kata Kapolres Putih kata FBR, kalau ada yang melawan Kapolres ana cabut golok. Setelah Kiai Fadholi bicara, akhirnya pembicara berikutnya sudah mulai sejuk. Sejuk semua. Tindak lanjut dari itu, FBR kemudian menjaga. FBR yang menjaga parkirnya. Ya, simbiosis mutualisme.



MODUL IV

PEMAHAMAN AKAN KONDISI LAPANGAN

Penulis: Leopold Sudaryanto

Jika pada materi-materi sebelumnya peserta difasilitasi untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan analisa di dalam ruangan atau situasi belajar yang terkondisi, maka pada materi ini peserta akan dipertemukan dengan kondisi riil di lapangan. Dialektika antara teori dan aturan (*das sein*) dan kenyataan lapangan (*das sollen*) tidak dapat disimplifikasi dengan bentuk kunjungan kolektif tanpa adanya alat bantu yang memfasilitasi peserta untuk dapat saling merefleksikan keduanya.

TUJUAN MATERI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengembangkan keahlian social dalam berkomunikasi dengan pelbagai kelompok, baik para senior petugas polisi yang sudah bertugas maupun kepada kelompok masyarakat umum. 2. Peserta dapat mempraktekan alat bantu analisis konflik dalam memahami akar masalah, peta actor dan kepentingan serta potensi penyelesaian masalah. 3. Peserta memiliki pemahaman langsung akan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda di dalam kepolisian diterapkan dalam penanganan konflik.
WAKTU	180 menit
TEMPAT	Komunitas atau kawasan yang pernah menghadapi konflik kekerasan bernuansa keagamaan
BAHAN	Setiap peserta membawa alat tulis, notes untuk mencatat, dan perlengkapan sederhana untuk melakukan dokumentasi visual atau audio

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Fasilitator akan menjelaskan tujuan dari kunjungan lapangan, proses yang akan dilalui serta output yang diharapkan dari setiap peserta (10 menit)
2. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari maksimal 10 orang. Diusahakan sedapat mungkin agar setiap kelompok mengunjungi wilayah yang berbeda. (5 menit)
3. Sebelum berangkat, setiap peserta diminta untuk mempelajari guiding questions yang sudah disiapkan dan melakukan pembagian tugas di dalam kelompok. (20 menit)
4. Setiap kelompok mulai melakukan pengumpulan data dalam bentuk observasi, interview dan telaah material tertulis apabila tersedia. (120 menit)
5. Setiap kelompok akan melakukan diskusi untuk menjawab guiding questions berdasarkan informasi yang didapatkan selama tahap 4. Summary akan ditulis didalam flip chart atau file power point.
6. Seluruh kelompok akan dikumpulkan untuk mempresentasikan secara bergantian hasil analisis konflik dan pelaksanaan peran kepolisian dalam penanganan konflik tersebut.
7. Fasilitator akan membantu menemukan point-point kesimpulan atau benang merah dari setiap presentasi.

PENANGANAN KONFLIK BERNUANSA KEAGAMAAN

